



**RENSTRA**

**RENCANA STRATEGIS**  
**TAHUN 2017 - 2022**

**DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan sesanti anghayubagia kehadapan Ida Shang Hyang Widhi Wasa dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah yang telah diberikan, sehingga Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Buleleng tahun 2017-2022 dapat diselesaikan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial 2017-2022 ini disusun disamping berdasarkan analisis lingkungan strategis Dinas Sosial juga mempedomani ataupun mengacu pada RPJMD Kabupaten Buleleng tahun 2017-2022 serta mempedomani kebijakan Pemerintah yang lebih tinggi seperti Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017 dan Permendagri 86 Tahun 2017.

Renstra Dinas Sosial substansinya memuat tentang permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, kinerja penyelenggaraan urusan dibidang sosial serta program pembangunan yang nantinya menjadi acuan di dalam penyelenggaraan pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang menjadi kewenangan Dinas Sosial. Renstra ini akan menjadi pedoman/acuan di dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta program dan kegiatan lainnya yang terkait.

Kami selaku Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Sosial menaruh harapan besar agar Renstra Dinas Sosial ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dalam rangka meningkatkan kepedulian, partisipasi dan keterlibatan peran aktif semua pihak dalam penanggulangan masalah sosial di Kabupaten Buleleng, sehingga masyarakat Buleleng semakin sejahtera, dalam rangka mendukung pencapaian visi misi dan program Kepala Daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 yakni dengan visi Bupati adalah **“Terwujudnya Masyarakat Uleleng Yang Mandiri, Sejahtera, Dan Berdaya Saing Berlandaskan Tri Hita Karana”**.

Dengan telah selesainya penyusunan Renstra ini, tidak lupa kami menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dorongan dalam penyusunan

Renstra Dinas Sosial ini, semoga apa yang telah diberikan mendapat rahmat/karunia dari Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa.

Singaraja, ..... 2018

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng,



**IGEDE SANDHIYASA, S.Sos. M.Si**

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19650704 198602 1 009

## DAFTAR ISI

	halaman
Halaman judul .....	i
Kata pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	iv
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	4
1.3 Maksud dan Tujuan .....	6
1.4 Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II     GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL</b>	<b>9</b>
2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas Sosial ...	9
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah .....	20
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial .....	27
2.4.Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan ...	42
<b>BAB III    PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL</b>	<b>46</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan.....	47
3.2Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	53
3.3Telaah Renstra K/L dan Renstra .....	56
3.4Telaah RTRW dan KLHS.....	61
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis .....	63
<b>BAB IV    TUJUAN DAN SASARAN</b>	<b>65</b>
4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial ...	66
<b>BAB V     STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	<b>69</b>
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD.....	69
5.2 Strategi dan Arah kebijakan Dinas Sosial .....	70
<b>BAB VI    RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>	<b>72</b>
6.1 Rencana Program dan Kegiatan Dinas Sosial .....	72
6.2 Indikasi Pendanaan Program dan Kegiatan .....	76

<b>BAB VII</b>	<b>KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN</b>	97
	7.1. Indikator Kinerja Urusan Sosial .....	97
	7.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Sosial .....	98
<b>BAB VIII</b>	<b>PENUTUP</b>	101
	8.1 Kaidah Pelaksanaan .....	101
	8.2 Penutup .....	102

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial, negara menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah dan berkelanjutan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan kepada perseorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial seperti 1) kemiskinan, 2) keterlantaran, 3) kedisabilitas, 4) ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, 5) korban bencana dan/atau 6) korban tindak kekerasan, eksploitasi dan deskriminasi.

Renstra Dinas Sosial merupakan Sistem Pemerintahan yang mengalami perubahan sejalan dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Perubahan tersebut mengharuskan pemerintah mewujudkan Pemerintahan yang baik (Good Government) sehingga dituntut terselenggaranya manajemen pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang demokratis, desentralistik dapat berjalan dengan baik, perlu adanya Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Buleleng, sebagai tolok ukur penilaian pertanggung jawaban kinerja pemerintah dalam kurun waktu tahun 2017-2022. Dinas Sosial yang merupakan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng mempunyai tugas pokok melakukan urusan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kesejahteraan Sosial diwajibkan menyusun Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

tahun 2017-2022. Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Buleleng merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Buleleng tahun 2017-2022.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disamping itu disebutkan pula bahwa perlu adanya dokumen perencanaan daerah sebagai acuan setiap perangkat daerah dalam bentuk rencana strategis (Renstra) sebagai tolak ukur penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Buleleng merupakan rencana dalam kurun waktu tahun 2017-2022 yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Buleleng serta berpedoman kepada RPJMD Pemerintah Kabupaten Buleleng dan bersifat indikatif. Renstra akan menjadi tolok ukur penilaian pertanggungjawaban Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng pada setiap akhir tahun anggaran.

Buleleng sebagai salah satu subsistem dari sistem nasional atau global, tidak dapat lepas dari pengaruh-pengaruh eksternal, yang tidak sepenuhnya dapat dikontrol. Oleh karena itu, dalam merencanakan pembangunan di Kabupaten Buleleng termasuk Bidang Kesejahteraan Sosial di masa depan, faktor-faktor global, sebagai faktor eksternal, harus mendapat perhatian serius, disamping faktor-faktor internal itu sendiri. Renstra Dinas Sosial Kabupaten Buleleng tahun 2017-2022 disusun berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal pemerintah, yang menggambarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dari segala aspek.

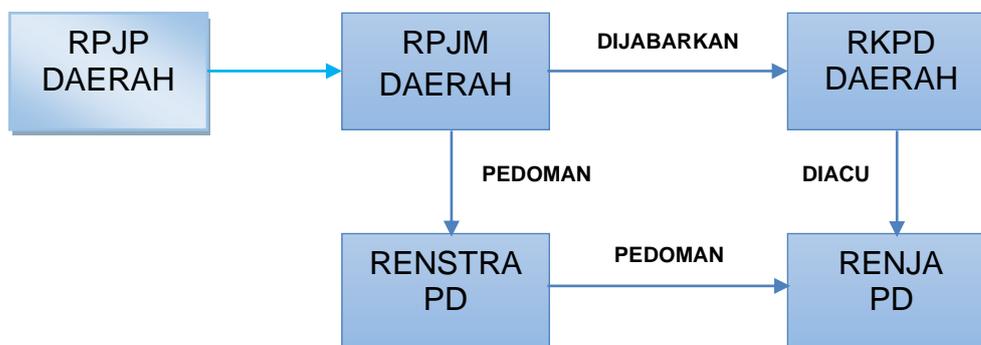
Secara garis besar Renstra Dinas Sosial Kabupaten Buleleng mencakup visi, misi kepala daerah serta strategi pencapaian visi maka ditetapkan program prioritas dengan kegiatan sesuai dengan kewenangan kabupaten, namun tetap diperlukan adanya dukungan semua pihak (pemerintah, swasta dan masyarakat).

Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran dan bagian tak terpisahkan dari Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Pemerintah Kabupaten Buleleng berkedudukan sebagai dokumen perencanaan Bidang Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Buleleng, yang mengakomodasi kebijakan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten, aspirasi masyarakat, swasta dan instansi/lembaga sosial terkait.

**Gambar 1.1**

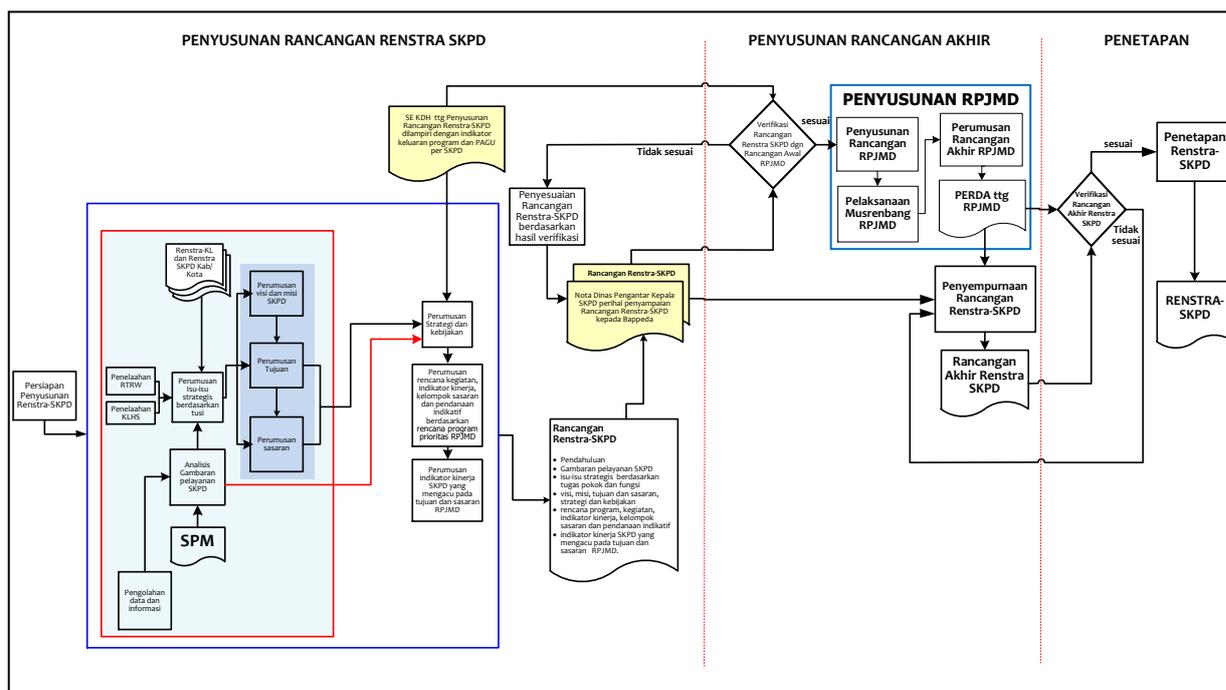
**Keterkaitan Antara Dokumen RPJMD Dengan Dokumen RKPD Dan Renstra PD**



Renstra Dinas Sosial Kabupaten Buleleng bersinergi dengan Renstra Provinsi Bali dan Renstra Kementerian Sosial Republik Indonesia yang ditunjukkan dengan penentuan isu strategis serta tujuan, sasaran, program dan kegiatan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan target indikator serta isu strategis sehingga penanganan ditingkat nasional hingga daerah mampu berjalan secara sinergis dan berkelanjutan.

Melihat konteks serta dinamika permasalahan kesejahteraan sosial yang ada saat ini dan dimasa mendatang, diharapkan Renstra Dinas Sosial (2017-2022) dapat memberikan solusi yang jelas dan terarah dalam kerangka pembangunan kesejahteraan sosial sebagai bagian dari pembangunan nasional dan daerah. Oleh karena itu dalam penyusunan Renstra Dinas Sosial perlu memahami potensi yang dimiliki serta melihat peluang dan tantangan kedepan, khususnya dalam mengantisipasi dinamika pembangunan dan permasalahan kesejahteraan sosial pada tingkat lokal. Dengan demikian, arah kebijakan dapat memberikan gambaran program dan strategi yang dapat diimplementasikan secara optimal sebagai solusi dalam pembangunan bidang kesejahteraan sosial.

**Gambar 1.2**  
**Bagan Penyusunan Renstra OPD**



## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Rancangan Awal, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Bali Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng Tahun 2013-2033;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 No 11);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud :**

Maksud disusunnya Renstra ini adalah sebagai penjabaran secara operasional visi, misi dan program Kepala Daerah yang digambarkan dalam bentuk program, kegiatan Dinas Sosial selama 5 (lima) tahun sesuai masa periode kepemimpinan Kepala Daerah.

#### **1.3.2 Tujuan :**

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Buleleng adalah :

- a. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan dilaksanakan/diselenggarakan oleh Dinas Sosial sebagai penjabaran visi dan misi Kepala Daerah terpilih selama 5 (lima) tahun;
- b. Merumuskan gambaran ketersediaan anggaran yang dapat dibelanjakan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan disertai sasaran dan lokus program/kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan;
- c. Menterjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial dengan berpedoman kepada Perda tentang RPJMD periode berkenaan.
- d. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD berkenaan.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 yakni :

## **BAB I PENDAHULUAN**

Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, Hubungan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dengan Dokumen Perencanaan lainnya dan sistematika penulisan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Buleleng.

## BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL

Bab ini menjelaskan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, dan kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dalam mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Rencana Strategis periode sebelumnya, capaian program prioritas Dinas Sosial yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya dan akan mengulas tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng .

## BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL

Bab ini memuat berbagai isu-isu strategis berdasarkan permasalahan yang ada pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng seperti identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi, telaahan visi, misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan telaahan Renstra K/L, serta penentuan isu-isu strategis.

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam RPJMD atas telaahan dari Visi dan Misi Kepala Daerah dan dikaitkan dengan tujuan dan sasaran pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Kabupaten Buleleng kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

## BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam bagian ini dikemukakan Strategi dan Arah Kebijakan Dinas sosial dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran selama kurun waktu lima tahun. Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang diperlukan selama 5 (lima) tahun.

## BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini menguraikan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang diperlukan selama 5 (lima) tahun.

## BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN DINAS SOSIAL

Dalam Bab ini diuraikan indikator kinerja yang akan ditetapkan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan serta indikator kinerja kunci (IKK) urusan sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng sesuai target capaian kinerja pada RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022.

## BAB VII PENUTUP

Pada bagian ini menjelaskan kembali mengenai kedudukan Renstra dalam proses pembangunan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, serta kaidah-kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL**

#### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Buleleng**

##### **2.1.1 Tugas Pokok**

Dinas Sosial Kabupaten Buleleng merupakan instansi pelaksanaan dan bagian dari Pemerintah Kabupaten Buleleng. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial bertanggung jawab kepada Bupati Buleleng melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 13 Tahun 2016 tanggal, 30 Nopember 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng dan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, maka Dinas Sosial mempunyai tugas pokok :

***Membantu Bupati  
Melaksanakan  
Urusan Pemerintahan  
di Bidang Sosial***

Untuk melaksanakan tugas-tugas di bidang sosial yang berhubungan dengan :

- a. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
- b. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
- c. Bidang Perlindungan Jaminan Sosial

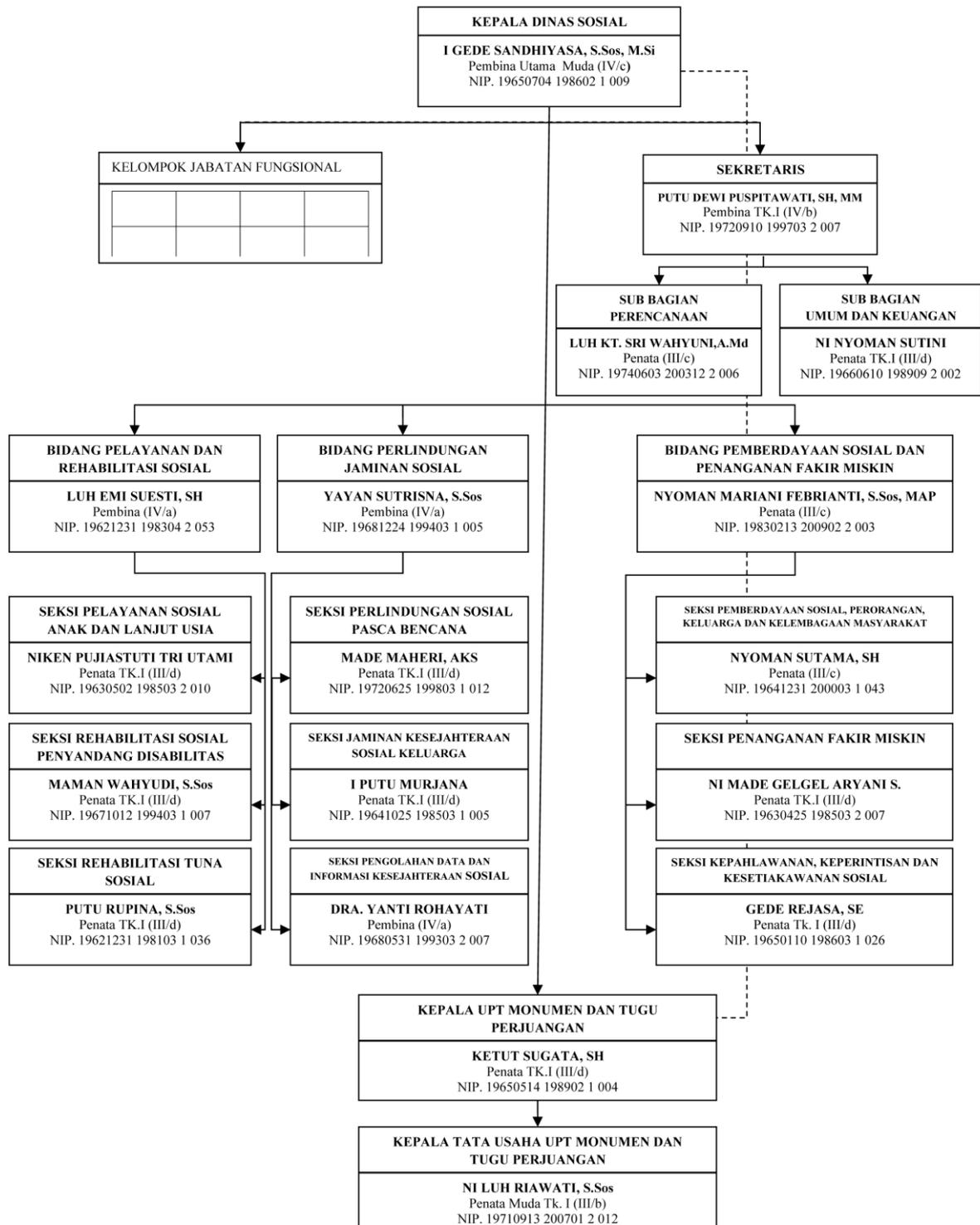
### 2.1.2 Fungsi

Untuk melaksanakan tugas-tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Peraturan Bupati tersebut diatas Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan di bidang Sosial;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang Sosial;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sosial;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Sosial;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

## 2.1.3 Struktur Organisasi

### STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG



Berdasarkan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 75 Tahun 2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Buleleng dan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan dibidang sosial. Secara organisasi / struktural Dinas Sosial Kabupaten Buleleng terdiri dari :

1. Kepala Dinas (Eselon II/b)
2. Sekretaris (Eselon III/a), dibantu 2 Sub Bagian :
  - a. Sub. Bagian Perencanaan (Eselon IV/a)
  - b. Sub. Bagian Umum dan Keuangan (Eselon IV/a)
3. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin (Eselon III/b), dibantu 3 Seksi :
  - a. Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat (Eselon IV/a)
  - b. Seksi Penanganan Fakir Miskin (Eselon IV/a)
  - c. Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial (Eselon IV/a)
4. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial (Eselon III/b), dibantu 3 Seksi :
  - a. Seksi Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia (Eselon IV/a)
  - b. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas (Eselon IV/a)
  - c. Seksi Rehabilitasi Tunas Sosial (Eselon IV/a)
5. Bidang Perlindungan Jaminan Sosial (Eselon III/b) I, dibantu 3 Seksi :
  - a. Seksi Perlindungan Sosial Pasca Bencana (Eselon IV/a)
  - b. Seksi Jaminan Kesejahteraan Sosial Keluarga (Eselon IV/a)
  - c. Seksi Pengolahan Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Eselon IV/a)
6. Kepala Unit Pelaksana Tugas (UPT) Monumen dan Tugu Perjuangan (Eselon IV/a), dibantu:
  - a. Kepala Tata Usaha UPT Monumen dan Tugu Perjuangan (Eselon IV/b)

Adapun uraian dari masing – masing kelompok tersebut diatas adalah sebagai berikut :

## 1. KEPALA DINAS

Kepala Dinas pada Dinas Sosial mempunyai tugas dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan dan merumuskan kebijakan operasional Dinas Sosial, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. merumuskan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan dibidang Sosial;
- e. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi sosial;
- f. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan Sosial dan Lanjut Usia;
- g. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Penyandang Dissabilitas;
- h. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Rehabilitasi Tuna Sosial;
- i. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Perlindungan Jaminan Sosial;
- j. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Perlindungan Sosial Pasca Bencana;
- k. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Jaminan Kesejahteraan Sosial Keluarga;
- l. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Pengolahan data dan informasi kesejahteraan soaial;
- m. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- n. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat;
- o. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;

- p. mengkoordinasikan dan melaksanakan pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi seluruh pelaksanaan kegiatan dilingkungan Dinas Sosial;
- q. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian Dinas Sosial serta UPT;
- r. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan keuangan, ketatausahaan dan barang milik daerah/ pemerintah di lingkungan Dinas Sosial;
- s. merumuskan penyusunan Rencana Strategik (RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di lingkungan Dinas Sosial;
- t. merumuskan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) di lingkungan Dinas Sosial;
- u. mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi dan system pengawasan internal (SPIP) dilingkungan Dinas Sosial;
- v. merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Dinas Sosial;
- w. merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di lingkungan Dinas Sosial;
- x. melaksanakan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai bidang tugas dan permasalahannya;
- y. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- z. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

## 2. SEKRETARIS

Sekretaris pada Dinas Sosial mempunyai tugas dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat berdasarkan data dan program Dinas Sosial serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. mengkoordinasikan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Sosial;

- e. mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan surat menyurat, tata usaha, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, keprotokolan, dokumentasi, kearsipan dan perpustakaan;
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi, tata laksana dan kepegawaian di lingkungan Dinas Sosial;
- g. mengkoordinasikan pelaksanaan inventarisasi, penatausahaan dan pengelolaan asset/barang milik pemerintah di lingkungan Dinas Sosial;
- h. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja, pembuatan laporan kegiatan dan pembuatan laporan pertanggung jawaban keuangan Dinas Sosial;
- i. mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran Dinas dan UPT;
- j. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategik (RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Dinas Sosial;
- k. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kerja (PK) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial;
- l. mengkoordinasikan penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Sosial;
- m. mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) Dinas Sosial;
- n. mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan reformasi birokrasi (RB) dan system pengawasan internal pemerintah (SPIP) di lingkungan Dinas Dinas Sosial;
- o. melaksanakan pengelolaan data dan informasi;
- p. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

### 3. BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, berdasarkan data dan program Dinas Sosial serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;

- d. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi peyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
- e. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan penggalian, pengembangan dan pendayagunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS);
- f. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis motivasi, bimbingan sosial, pengembangan dan pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan organisasi sosial;
- g. memfasilitasi dan memberikan petunjuk teknis dan pembinaan terhadap mitra-mitra kerja, pilar-pilar partisipasi masyarakat dalam kegiatan usaha kesejahteraan sosial;
- h. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan bimbingan teknis dan penerbitan izin bagi penyelenggara pengumpulan sumbangan sosial/penyelenggara undian gratis berhadiah berskala Kabupaten;
- i. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan penertiban dan pengawasan undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang/barang;
- j. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pemberian bimbingan sosial dan bantuan sosial guna meningkatkan pelayanan sosial masyarakat yang berada di lingkungan perkotaan, pedesaan dan pesisir yang kurang layak huni/kumuh;
- k. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pemberian bimbingan sosial dan bantuan sosial guna meningkatkan pelayanan sosial bagi fakir miskin, keluarga rentan, kelompok/keluarga muda mandiri dan perempuan rawan sosial ekonomi;
- l. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial sesuai pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan provinsi;
- m. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

#### 4. BIDANG PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL

Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, berdasarkan data dan program Dinas Sosial serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. memfasilitasi, dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, fisik dan mental, tuna susila, gelandangan, pengemis, eks penderita penyakit kronis, eks narapidana, eks psikotik, eks pecandu narkoba (korban penyalahgunaan Napza), pengguna psikotropika sindroma ketergantungan, orang dengan Human Immuno Deficiency Virus / Acquired Immuno Deficiency Syndrome, korban tindak kekerasan, korban perdagangan orang, orang gila terlantar, anak terlantar, anak dengan kebutuhan khusus dan Lanjut usia terlantar;
- f. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan pendataan, inventarisasi, pemberian bimbingan sosial dan bimbingan teknis, melatih, pemberian bantuan sosial, pemberian santunan hidup, rehabilitasi serta supervisi di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, fisik dan mental, tuna susila, gelandangan, pengemis, eks penderita penyakit kronis, eks narapidana, eks psikotik, eks pecandu narkoba (Napza), pengguna psikotropika sindroma ketergantungan, orang dengan Human Immuno Deficiency Virus / Acquired Immuno Deficiency Syndrome, korban tindak kekerasan, korban perdagangan orang, orang gila terlantar, anak terlantar, anak dengan kebutuhan khusus dan lanjut usia terlantar dan tidak produktif;
- g. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan tugasnya kepada atasan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

## 5. BIDANG PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL

Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial, pada Dinas Sosial mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, berdasarkan data dan program Dinas Sosial serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi kerja sama dengan instansi terkait dan lintas sektoral dalam pelaksanaan pembinaan, bantuan dan pengendalian perlindungan sosial terhadap korban bencana baik alam maupun sosial;
- e. memfasilitasi dan melaksanakan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban pasca bencana;
- f. memfasilitasi dan melaksanakan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana;
- g. memfasilitasi dan melaksanakan pendataan, menginventarisasi perlindungan sosial bagi keluarga dalam keadaan darurat;
- h. memfasilitasi dan melaksanakan pendataan, menginventarisasi, menyusun pedoman/petunjuk teknis dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan perlindungan sosial;
- i. memfasilitasi dan melaksanakan pendataan, menginventarisasi, pengembangan sumber daya manusia dan pendamping bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- j. memfasilitasi dan melaksanakan pendataan, menginventarisasi dan mengembalikan orang terlantar ketempat asal sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
- k. memfasilitasi dan melaksanakan pendataan, menginventarisasi, mengevaluasi dan melaksanakan penguburan mayat terlantar;
- l. memfasilitasi pelaksanaan pembinaan dan pelatihan kepada Taruna Siaga Bencana (Tagana);
- m. memfasilitasi dan melaksanakan pendataan, menginventarisasi dan melaksanakan pemberian jaminan kesejahteraan sosial bagi keluarga sangat miskin, pekerja sektor informal dan pekerja mandiri, melalui program keluarga harapan sesuai peraturan perundang-undangan;

- n. memfasilitasi dan melaksanakan pendataan/pemutahiran data, pengolahan dan pengelolaan data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) berskala Kabupaten;
- o. memfasilitasi dan melaksanakan pengelolaan, verifikasi dan validasi data fakir miskin, data penerima program perlindungan dan jaminan sosial serta informasi kesejahteraan sosial berskala Kabupaten;
- p. memfasilitasi dan melaksanakan Penyuluhan Sosial dibidang usaha kesejahteraan sosial, serta memberikan informasi pengembangan kesejahteraan sosial;
- q. memfasilitasi dan melaksanakan pengembangan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS);
- r. memfasilitasi penyiapan bahan, data dan melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan dalam usaha kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- s. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- t. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

## 6. UPT MONUMEN DAN TUGU PERJUANGAN

Kepala UPT Monumen dan Tugu Perjuangan pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, mempunyai Tugas dan Fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan UPT. Monumen dan Tugu Perjuangan, berdasarkan data dan program Dinas Sosial serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi kerja sama dengan instansi terkait dan lintas sektoral dalam pelaksanaan pemeliharaan, penggunaan dan pemanfaatan Monumen dan Tugu Perjuangan yang ada di Kabupaten Buleleng;
- e. memfasilitasi dan melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan Monumen dan Tugu Perjuangan.

Dari uraian diatas jumlah pejabat struktural yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai SOTK terdiri dari :

- Pejabat Eselon II/b sebanyak 1 orang;
- Pejabat Eselon III/a sebanyak 1 orang;
- Pejabat Eselon III/b sebanyak 3 orang;
- Pejabat Eselon IV/a sebanyak 12 orang;
- Pejabat Eselon IV/b sebanyak 1 orang;
- Staf PNS sebanyak 11 orang;
- Honor Daerah sebanyak 3 orang; dan
- Tenaga Kontrak Kerja sebanyak 101 orang.

## 2.2 Sumber Daya Dinas Sosial

Dinas Sosial Kabupaten Buleleng sebagai organisasi perangkat daerah yang bertanggungjawab dan memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Kabupaten Buleleng dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tentunya perlu mengoptimalkan berbagai sumber daya baik sumber daya manusia maupun sarana penunjang yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dalam mencapai target kinerja selama 5 (lima) tahun.

### 1. Dinas Sosial

Jumlah pegawai yang ada pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng saat ini sebanyak 133 orang terdiri dari 29 orang PNS, 3 orang honor daerah dan 101 orang tenaga kontrak kerja, dengan rincian menurut jenis kelamin, jenjang pendidikan dan golongan ruang sebagai berikut :

#### 1.1 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Sosial Kabupaten Buleleng sampai dengan tahun 2019.

Tabel 2.2.1  
Daftar PNS Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

No.	Pangkat/Golongan Ruang	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	2	3	4	5
1	Juru Muda (I/a)	-	-	-
2	Juru (I/c)	-	-	-
3	Juru Tk. I (I/d)	-	-	-

4	Pengatur Muda (II/a)	1	-	1
5	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	-	-	-
6	Pengatur (II/c)	1	2	3
7	Pengatur Tk. I (II/d)	1	2	3
8	Penata Muda (III/a)	1	1	2
9	Penata Muda Tk. I (III/b)	1	1	2
10	Penata (III/c)	1	2	3
11	Penata Tk. I (III/d)	6	4	10
12	Pembina (IV/a)	1	2	3
13	Pembina Tk. I (IV/b)	1	-	1
14	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	-	1
Jumlah		15	14	29

Sumber Data : Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

## 1.2 Jumlah Tenaga Kontrak Dinas Sosial Kabupaten Buleleng sampai tahun 2019

Tabel 2.2.2  
Daftar Tenaga Kontrak Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

No	Status Kontrak	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	2	3	4	5
1	Tenaga Kontrak Administrasi	25	26	51
2	Tenaga Kontrak Sopir	5	-	5
3	Tenaga Kontrak Tukang Kebun / Cleaning Sevice	27	10	37
4	Tenaga Kontrak Penjaga Kantor	8	-	8
Jumlah		65	36	101

Sumber Data : Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

Dengan perincian tugas pada bagian Sekretariat dan masing-masing bidang sebagai berikut :

a. Menurut Jenis Kelamin :

Tabel 2.2.3

Data Pegawai PNS Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Menurut Jenis Kelamin

No	Pegawai pada Sekretariat/Bidang	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	2	3	4	5
1	Kepala Dinas	1	-	1
2	Sekretariat	3	9	12
3	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	2	2	4
4	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	2	2	4
5	Bidang Perlindungan Jaminan Sosial	5	1	6
Jumlah		13	14	27

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

b. Menurut Jenjang Pendidikan (PNS)

Tabel 2.2.4

Data Pegawai PNS Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Menurut Jenjang Pendidikan

No	Pegawai pada Sekretariat/Bidang	Pendidikan						Jumlah
		S2	S1	D3	SMA	SMP	SD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kepala Dinas	1						1
2	Sekretariat	1	2	1	8			12
3	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	1	2		1			4
4	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial		3		1			4
5	Bidang Perlindungan Jaminan Sosial		3		3			6
Jumlah		3	10	1	13			27

Sumber Data : Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

c. Menurut Jenis kelamin (Tenaga kontrak)

Tabel 2.2.5.  
Data Pegawai Kontrak pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng  
Menurut Jenis Kelamin

No	Pegawai pada Sekretariat/Bidang	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	2	3	4	5
1	Sekretariat	14	12	26
2	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	10	5	15
3	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	6	6	12
4	Bidang Perlindungan Jaminan Sosial	11	3	14
Jumlah		41	24	67

Sumber Data : Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

d. Menurut Jenjang Pendidikan (tenaga kontrak)

Tabel 2.2.6  
Data Pegawai Kontrak Dinas Sosial Kabupaten Buleleng  
Menurut Jenjang Pendidikan

No	Pegawai pada Sekretariat/Bidang	Pendidikan						Jumlah
		S2	S1	D3	SMA	SMP	SD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sekretariat		6	4	14	2		26
2	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin		5		10			15
3	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial		5		7			12
4	Bidang Perlindungan Jaminan Sosial		5	2	7			14
Jumlah			21	5	39	2		67

Sumber Data : Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

e. Menurut Golongan Ruang :

Tabel 2.2.7

Data Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Menurut Golongan

No	Pegawai pada Sekretariat/Bidang	Golongan																Jml
		I				II				III				IV				
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Kepala Dinas															1		1
2	Sekretariat					1		3	2	2	1	1	1		1			12
3	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin											1	3					4
4	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial												3	1				4
5	Bidang Perlindungan Jaminan Sosial							1		1			2	2				6
Jumlah						1		3	3	2	2	2	9	3	1	1		27

Sumber Data : Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

## 2. U P T

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada pada UPT Dinas Sosial Kabupaten Buleleng saat ini sebanyak 2 orang dan dibantu oleh 24 orang tenaga kontrak yang bertugas sebagai tenaga cleaning service/tukang kebun, 6 orang sebagai penjaga kantor dan 4 orang sebagai tenaga administrasi pada Monumen/Tugu Perjuangan.

Rincian PNS di UPT menurut jenis kelamin, jenjang pendidikan dan golongan ruang sebagai berikut :

a. Menurut Jenis Kelamin

Tabel 2.2.8  
Data Pegawai pada UPT Dinas Sosial Kabupaten Buleleng  
Menurut Jenis Kelamin

No	Pegawai pada Sekretariat/Bidang	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	2	3	4	5
1	Kepala UPT	1	-	1
2	Tata Usaha	-	1	1
Jumlah		1	1	2

Sumber Data : Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

b. Menurut Jenjang Pendidikan

Tabel 2.2.9  
Data Pegawai UPT Dinas Sosial Kabupaten Buleleng  
Menurut Jenjang Pendidikan

No	Pegawai pada Sekretariat/Bidang	Pendidikan						Jumlah
		S2	S1	D3	SMA	SMP	SD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kepala UPT		1					1
2	Tata Usaha		1					1
Jumlah			2					2

Sumber Data : Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

c. Menurut Golongan Ruang

Tabel 2.2.10  
Data Pegawai UPT Dinas Sosial Kabupaten Buleleng  
Menurut Jenjang Golongan

No	Pegawai pada Sekretariat/Bidang	Golongan																Jml
		I				II				III				IV				
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Kepala UPT												1					1
2	Tata Usaha											1						1
Jumlah												1	1					2

Sumber Data : Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

Berdasarkan data tersebut diatas bahwa Dinas Sosial dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya terhadap sumber daya PNS masih dianggap kurang, hal ini terkait dengan tugas-tugas yang dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku mempersyaratkan tenaga yang diharuskan adalah PNS, disamping itu dari jenis pendidikan Dinas Sosial kekurangan tenaga PNS dengan dasar pendidikan dari Ekonomi, Pekerjaan Sosial, Informatika dan tenaga teknis bangunan, hal ini dibutuhkan karena Dinas Sosial mengelola banyak Bangunan Monumen Tugu Perjuangan yang perlu diawasi dan dipelihara kelestariannya.

Terhadap daya dukung sarana prasarana yang ada, Dinas Sosial menempati Gedung Kantor yang beralamat di jalan Veteran No. 7 Singaraja, yang jumlah gedungnya terdiri dari : 4 Gedung Kantor dan Ruang Rapat, 1 Gedung sebagai Gudang Buffer Stock Bencana, Tempat Parkir Roda Empat dan tempat parkir kendaraan roda dua.

Mengelola 5 Bangunan Monumen/Tugu Perjuangan dibawah UPT yaitu: Monumen Bhuana Kerta, Monumen Tri Yudha Sakti, Monumen Ayodya Pura, Monumen Jagaraga dan Monumen Wira Bhuana serta 1 buah Taman Makam Pahlawan (TMP) Curastana Singaraja.

Sarana prasarana pendukung lainnya seperti kendaraan Dinas Operasional terdapat 2 buah (1 kendaraan bencana "RESCUE" bantuan Kemensos RI. dan 1 kendaraan operasional dinas milik Pemkab Buleleng) dan 2 kendaraan sewa untuk operasional Kepala Dinas dan Sekretaris, terdapat pula 1 kendaraan Roda 6 (DUMLAP = Dapur Umum Lapangan) untuk Bencana bantuan dari Kemensos RI (pinjam pakai), kendaraan roda 2 sebanyak 14 unit. Kondisi ini masih dianggap kurang mengingat kegiatan operasional dilapangan dalam penanganan PMKS sangat diperlukan kendaraan roda 4 khususnya untuk mengangkut bantuan berupa Truk atau kendaraan Pick Up.

Sarana lainnya seperti Komputer, printer, meja dan kursi kerja dan sarana pendukung lainnya sudah mencukupi, hanya saja perlu dilakukan perawatan untuk kelancaran dalam melaksanakan tugas.

Alamat Kantor Dinas Sosial Kabupaten Buleleng di Jalan Veteran No. 7 Singaraja Nomor Telp (Fax) : (0362) 21248 dan sarana dan prasarana yang dimiliki

Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dalam menunjang kinerja penyelenggaraan tugas dan fungsi.

### **2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial**

Selama kurun waktu 5 tahun Dinas Sosial telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan serta pencapaian kinerja terhadap target RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2012-2017.

Sedangkan pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial selama kurun waktu 5 tahun dari tahun 2012-2017 sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :

**Tabel 2.3.1**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG**  
**PADA RPJMD TAHUN 2012 – 2017**

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR RPJMD (2012-2017)	TARGET RENSTRA TAHUN					REALISASI CAPAIAN TAHUN					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN					RATA 2 CAPAIAN 5 TH
					2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1	Meningkatnya Jumlah dan keterampilan petugas pendamping sosial pemberdayaan FM, KAT dan PMKS lainnya	30 %	-	740 orang	30 org	148 org	148 org	148 org	148 org	30 org	165 org	148 org	174 org	148 org	100%	100 %	111 %	100 %	117%	105,6 %
2	Meningkatnya Jumlah Fakir Miskin yang terampil dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif melalui KUBE.	30 %	-	340 org/KK	0	30 org	50 org	70 org	90 org	0	0	0	70 org	100 org	0%	0%	0%	100 %	111%	42,2 %
3	Meningkatnya sarana / prasarana perumahan bagi keluarga miskin berupa penerimaan bahan bangunan rumah	-	-	385 KK	100	35 KK	50KK	75 KK	100 KK	310 KK	48 KK	78 KK	6 KK	26 KK	310%	137 %	156 %	8 %	26 %	127,4 %
4	Jumlah sasaran penanganan tanggap darurat dan kejadian luar biasa (KLB)	100 %	-	1.550 KK	200 KK	350 KK	400 KK	400 KK	400 KK	300 KK	300 KK	413 KK	404 KK	500 KK	150 %	85,7 %	103 %	101 %	125 %	112,9 %
5	Jumlah sasaran pelayanan dan perlindungan sosial korban hukum, eksploitasi dan perdagangan anak dan perempuan	-	-	1.375 KK	15 org	175 org	200 org	225 org	250 org	25 org	175 org	225 org	225 org	180 org	166,6%	100 %	112,5 %	100 %	72%	110%

6	Jumlah sasaran pelayanan anak terlantar (anak jalanan, anak nakal, anak cacat dan anak putus sekolah) mendapat pelatihan keterampilan kerja .	-	-	85 Orang	5 org	10 org	15 org	20 org	20 org	10 org	10 org	10 org	10 org	20 org	10 org	200%	100 %	66,6 %	100 %	50%	103,3 %
7	Persentase cakupan jumlah anak terlantar mendapat bantuan dan pembinaan/keterampilan	-	-	950 anak	200 anak	220 anak	552 anak	660 anak	792 anak	212 anak	220 anak	220 anak	820 anak	800 anak	105%	100 %	38%	124 %	101%	93,6 %	
8	Meningkatnya kemandirian dan keterampilan penyandang cacat dalam berusaha	-	100 %	90 orang	10 org	10 org	20 org	20 org	20 org	10 org	10 org	15 org	20 org	20 org	100%	100 %	75 %	100 %	100 %	95 %	
9	Persentase cakupan pemenuhan kebutuhan dasar penyandang cacat dan eks trauma	35%	100%	927 orang	150 org	127 org	200 org	200 org	200 org	192 org	151 org	138 org	228 org	178 org	128 %	118,8 %	69%	114 %	89%	103,6 %	

Sumber Data : Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

Dari uraian tabel tersebut diatas dapat disampaikan bahwa capaian kinerja Dinas Sosial terhadap target RPJMD Kabupaten Buleleng tahun 2012-2017 yaitu :

Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) seperti : Peningkatan Kemampuan pendamping sosial Fakir Miskin, Bantuan perumahan kepada keluarga miskin yang memiliki rumah tidak layak huni, penanganan korban bencana alam, pembinaan keterampilan dan bantuan kepada anak terlantar, anak nakal, bantuan bagi penyandang disabilitas, pelayanan dan perlindungan sosial korban hukum, eksploitasi dan perdagangan anak dan perempuan rata-rata tercapai antara 103% sampai 127%, sedangkan capaian kinerja terhadap Pemberdayaan Fakir Miskin melalui program KUBE, penanganan terhadap anak terlantar dan pelatihan keterampilan abagi penyandang cacat baru tercapai antara 42,2% sampai 95% hal ini disebabkan karena terhadap permasalahan tersebut kesulitan dalam mencari data calon penerima manfaat. Untuk itu ditahun mendatang akan diprioritaskan dalam proses verifikasi dan validasi data PMKS.

Selanjutnya untuk mengetahui hasil pelayanan kinerja terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) selama 5 tahun dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.3.2  
Rekapitulasi Capaian Pelayanan Kinerja Dinas Sosial  
Terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

NO	JENIS PMKS	JUMLAH PMKS TAHUN 2012	HASIL PELAYANAN 5 TAHUN (2012-2016)	YANG BELUM TERLAYANI (SESUAI DATA 2016)	PERSENTASE (%)
1	2	3	4	5	6 (4:3 x 100%)
1.	Anak Balita Terlantar	331	101	230	30,5 %
2.	Anak Terlantar	2.212	2.272	1.654	102,7 %
3.	Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	185	70	140	37,8 %
4.	Anak Jalanan	29	29	28	100 %
5.	Wanita Rawan Sosial Ekonomi (KK)	3.998	20	4.225	0,5 %
6.	Anak Korban Tindak Kekerasan	94	25	5	26,5 %

7.	Lanjut Usia Terlantar	4.521	4.300	4.132	95,11 %
8.	Penyandang Disabilitas	4.768	1.547	4.656	32,44 %
9.	Tuna Susila	25	25	26	100 %
10.	Pengemis	98	98	0	100 %
11.	Gelandangan	-	50	16	50 %
12.	Bekas Warga Binaan Lembaga Masyarakat	297	75	417	25,25 %
13.	Korban penyalahgunaan Napza	15	27	42	180 %
14.	Keluarga Fakir Miskin/RTM (KK)	47.908	7.780	49.231	16,23 %
15.	Pemulung	0	0	18	0
16.	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis (KK)	61	0	38	0 %
17.	Komunitas Adat Terpencil	-	-	-	-
18.	Korban Bencana Alam (KK)	285	2.263 KK	445	794 %
19.	Korban Bencana Sosial (KK)	108	108	4	100 %
20.	Pekerja Migran Terlantar/Bermasalah Sosial	43	0	21	0 %
21.	Penyandang HIV/AIDS	19	20	1.212	105 %
22.	Keluarga Rentan (KK)	846	0	702	0 %
23.	Korban Trafiking	1	1	0	100 %
24.	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	12	6	8	50 %
25.	Kelompok Minoritas	50	35	34	70 %
<b>Jumlah</b>				<b>66.509</b>	

*Sumber Data : Dinas Sosial Kabupaten Buleleng*

- Dari Data capaian tersebut diatas maka terdapat PMKS yang perlu mendapat perhatian lima tahun mendatang yaitu : Masalah Fakir Miskin (49.231 KK), Penyandang Disabilitas (4.656 orang), Wanita Rawan Sosial Ekonomi (4.225 orang), masalah Lanjut Usia terlantar (4.132 orang), Anak terlantar (1.654 orang), Penyandang HIV/AIDS (1.212 orang), Keluarga Rentan (702 KK), Bekas warga binaan lembaga kemasyarakatan (417 orang) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya sesuai perkembangan data pada tahun berjalan.
- Hasil Penerapan Capaian Target dan Rencana Pembiayaan terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial di Kabupaten Buleleng tahun 2013-2016 sebagaimana dalam tabel 2.3.3 berikut :

NO	PELAYANAN DASAR			CAPAIAN 2012 (%)	GAP	TARGET DAN CAPAIAN REALISASI SPM URUSAN SOSIAL 2013-2016											TOTAL CAPAIAN 2013-2016 (%)	
	INDIKATOR	TARGET DAERAH (%)	BATAS WAKTU			TAHUN 2013			TAHUN 2014			TAHUN 2015			TAHUN 2016			
						TARGET (%)	PROGRAM/KEGIATAN	REALISASI (%)	TARGET (%)	PROGRAM/KEGIATAN	REALISASI (%)	TARGET (%)	PROGRAM/KEGIATAN	REALISASI (%)	TARGET (%)	PROGRAM/KEGIATAN		REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	50	12 Bln	12,86	37,14	9,3	Pemberdayaan Fakir Miskin, dan PMKS	1,72	9,3	Pemberdayaan Fakir Miskin, dan PMKS	6,27	9,3	Pemberdayaan Fakir Miskin, dan PMKS	8,75	9,3	Pemberdayaan Fakir Miskin, dan PMKS	7,52	24,26 (Gap 12,88)
2	Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.	30	12 Bln	15	15	3,7	Pemberdayaan Fakir Miskin, dan PMKS	0	3,7	Pemberdayaan Fakir Miskin, dan PMKS	0	3,7	Pemberdayaan Fakir Miskin, dan PMKS	1,79	3,7	Pemberdayaan Fakir Miskin, dan PMKS	2,59	4,38 (gap 10,62)
3	Persentase (%) panti sosial skala kabupaten/kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	80	12 Bln	30	50	12,5	Pembinaan Panti Asuhan	12,5	12,5	Pembinaan Panti Asuhan	12,5	12,5	Pembinaan Panti Asuhan	12,5	12,5	Pembinaan Panti Asuhan	12,5	50
4	Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	30	12 Bln	10	20	5	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	1,81	5	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	1,84	5	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	0	5	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	1,25	1,22 (Gap 18,78)
5	Persentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100	12 Bln	100	0	100	Pelayanan dan rehabilitasi Sosial	100	100	Pelayanan dan rehabilitasi Sosial	100	100	Pelayanan dan rehabilitasi Sosial	100	100	Pelayanan dan rehabilitasi Sosial	100	100

6	Presentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	100	12 Bln	100	0	100	Pelayanan dan rehabilitasi Sosial	100	100	Pelayanan dan rehabilitasi Sosial	100	100	Pelayanan dan rehabilitasi Sosial	100	100	Pelayanan dan rehabilitasi Sosial	100	100
7	Presentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	35	12 Bln	20	15	3,75	Pelayanan Penyandang cacat dan Lansia	0,88	3,75	Pelayanan Penyandang cacat dan Lansia	1,70	3,75	Pelayanan Penyandang cacat dan Lansia	11,35	3,75	Pelayanan Penyandang cacat dan Lansia	11,52	25,45
	JUMLAH	60,71 %																43,61 %

Sumber Data : Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Sosial terhadap 4 jenis pelayanan dasar dengan target daerah yang rata-rata 60,71% secara kumulatif baru dapat tercapai sekitar 43,61%, hal ini menyesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah, selain itu penyebabnya adalah masih tingginya angka PMKS di Kabupaten Buleleng khususnya angka Fakir Miskin, Penyandang Disabilitas, Lanjut Usia Terlantar dan Data Anak terlantar.

- Selanjutnya disampaikan rekapitulasi capaian kinerja Dinas Sosial terhadap RPJMD yang telah berjalan selama 5 tahun 2012-2017 yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.3.4  
Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Sosial  
RPJMD Tahun 2012-2017

NO	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET RPJMD (2012-2017)	CAPAIAN RPJMD (2012-2017)	PROSENTASE (%)
1	2	3	4	5
1.	<b>Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya</b>			
1.1	Meningkatnya Jumlah dan keterampilan petugas pendamping sosial pemberdayaan FM, KAT dan PMKS lainnya.	740 Orang	813 Orang	109,8 %
1.2	Meningkatnya Jumlah Fakir Miskin yang terampil dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif melalui KUBE.	340 KK/Orang	340 KK/ Orang	100 %
1.3	Meningkatnya sarana / prasarana perumahan bagi keluarga miskin berupa penerimaan bahan bangunan rumah.	385 KK	526 KK	108 %
2	<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>			
2.1	Jumlah sasaran penanganan tanggap darurat dan kejadian luar biasa (KLB)	1.550 Orang	2.263 Orang	129 %
2.2	Jumlah sasaran pelayanan dan perlindungan sosial korban hukum, eksploitasi dan perdagangan anak dan perempuan	1.375 Orang	1.380 Orang	99,28 %
2.3	Jumlah sasaran pelayanan anak terlantar (anak jalanan, anak nakal, anak cacat dan anak putus sekolah) mendapat pelatihan keterampilan kerja.	85 anak	80 anak	88,90 %

3.	<b>Program pembinaan Anak Terlantar</b>			
3.1	Persentase cakupan jumlah anak terlantar mendapat bantuan dan pembinaan/keterampilan	950 anak	2.977 anak	258,80 %
4.	<b>Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma</b>			
4.1	Meningkatnya kemandirian dan keterampilan penyandang cacat dalam berusaha	90 Orang	105 Orang	105 %
4.2	Persentase cakupan pemenuhan kebutuhan dasar penyandang cacat dan eks trauma	927 Orang	1.442 Orang	133,8 %

- Faktor -faktor yang mempengaruhi terhadap capaian kinerja tersebut diantaranya tersedianya anggaran dari APBD dalam upaya penanganan PMKS di Kabupaten Buleleng, adanya koordinasi yang baik antar SKPD dalam upaya penanganan PMKS tersebut, Tersedianya sarana prasarana dalam rangka menunjang operasional pelaksanaan kegiatan.
- Faktor-faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan diantaranya cukup tingginya angka PMKS di kabupaten Buleleng sehingga memerlukan proses identifikasi yang cermat dan anggaran yang besar dalam penentuan pelayanan, kurangnya sumber daya yang handal khususnya dalam penanganan masalah masalah sosial yang bersifat spesifik seperti tenaga dari profesi kesejahteraan sosial, Kurang akuratnya data PMKS yang disampaikan oleh Desa/Kelurahan sehingga menyulitkan dalam menentukan skala prioritas penerima program.

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Dinas Sosial Kabupaten Buleleng memperoleh dukungan anggaran yang bersumber dari APBD. Besarnya anggaran dan capaian kinerja keuangan dan pencapaian kinerja pelayanan dinas selama 5 (lima) tahun dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3.5  
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2012-2016

Urusan Bidang Sosial	Anggaran Pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke - (Juta)					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016		
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA</b>	770.003.800,00	785.460.000,00	1.111.474.000,00	324.778.480,00	1.564.835.165,00	713.821.600,00	782.804.575,00	1.102.915.300,00	322.295.674,00	1.527.775.346,00	92,70	99,66	99,23	99,24	97,63	88,64	88,45
- Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya	151.293.800,00	-	78.107.000,00	63.778.480,00	85.850.000,00	148.744.750,00	-	77.902.400,00	63.640.694,00	83.291.711,00	98,32	-	99,74	99,78	97,02	(20,93)	(21,86)
- Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin	96.750.000,00	-	-	93.000.000,00	130.230.000,00	96.613.525,00	-	-	91.865.900,00	127.674.220,00	99,86	-	-	98,78	98,04	(14,99)	(15,26)
- Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin	521.960.000,00	785.460.000,00	1.033.367.000,00	168.000.000,00	1.348.755.165,00	468.463.325,00	782.804.575,00	1.025.012.900,00	166.789.080,00	1.316.809.415,00	89,75	99,66	99,19	99,28	97,63	175,28	175,95

<b>PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL</b>	354.849.485,00	408.110.000,00	478.470.000,00	597.783.900,00	516.975.718,00	346.184.300,00	397.902.430,00	470.396.350,00	585.118.220,00	508.770.820,00	97,56	97,50	98,31	97,88	98,41	10,92	11,12
- Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak	19.800.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	24.283.900,00	31.589.518,00	19.398.590,00	30.547.300,00	34.713.850,00	24.121.400,00	31.566.658,00	97,97	87,28	99,18	99,33	99,93	19,06	17,87
- Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	18.089.485,00	33.250.000,00	34.750.000,00	30.000.000,00	3.082.700,00	17.087.270,00	32.942.360,00	34.662.900,00	29.741.250,00	2.608.370,00	94,46	99,07	99,75	99,14	84,61	(3,77)	(1,85)
- Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal	-	56.950.000,00	56.950.000,00	74.500.000,00	64.936.000,00	-	55.662.060,00	56.695.650,00	74.024.900,00	64.720.381,00	-	97,74	99,55	99,36	99,67	4,49	4,96
- Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	148.000.000,00	169.210.000,00	155.790.000,00	106.000.000,00	137.872.500,00	140.742.425,00	168.317.460,00	148.980.550,00	103.500.770,00	132.287.510,00	95,10	99,47	95,63	97,64	95,95	1,13	1,35

-	Pembinaan dan bimbingan motivasi kepada Lansia di luar panti	168.960.000,00	113.700.000,00	195.980.000,00	363.000.000,00	279.495.000,00	168.956.015,00	110.433.250,00	195.343.400,00	353.729.900,00	277.587.901,00	100,00	97,13	99,68	97,45	99,32	25,47	25,45
<b>PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR</b>		116.588.000,00	73.050.000,00	75.150.000,00	151.000.000,00	169.140.000,00	116.381.420,00	71.716.700,00	74.853.500,00	150.457.150,00	166.831.105,00	99,82	98,17	99,61	99,64	98,63	19,62	19,47
-	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar	116.588.000,00	73.050.000,00	75.150.000,00	151.000.000,00	169.140.000,00	116.381.420,00	71.716.700,00	74.853.500,00	150.457.150,00	166.831.105,00	99,82	98,17	99,61	99,64	98,63	19,62	19,47
<b>PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA</b>		375.930.000,00	192.562.000,00	178.372.000,00	164.000.000,00	186.422.593,00	309.847.967,00	188.450.120,00	174.610.200,00	161.234.170,00	183.765.965,00	82,42	97,86	97,89	98,31	98,57	(12,63)	(10,05)
-	Pembangunan sarana dan prasarana perawatan para penyandang cacat dan trauma	64.120.000,00	-	-	-	-	3.598.197,00	-	-	-	-	5,61	-	-	-	-	(25,00)	(25,00)
-	Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma	71.863.500,00	41.662.000,00	42.262.000,00	50.000.000,00	46.831.000,00	70.640.360,00	40.359.860,00	41.629.000,00	48.816.250,00	46.172.870,00	98,30	96,87	98,50	97,63	98,59	(7,15)	(6,97)
-	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	239.946.500,00	150.900.000,00	136.110.000,00	114.000.000,00	139.591.593,00	235.609.410,00	148.090.260,00	132.981.200,00	112.417.920,00	137.593.095,00	98,19	98,14	97,70	98,61	98,57	(10,18)	(10,10)

<b>PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN/ PANTI JOMPO</b>	96.152.000,00	178.860.000,00	101.310.000,00	100.000.000,00	96.051.666,00	95.128.710,00	172.699.800,00	99.454.550,00	99.809.330,00	96.040.830,00	98,94	96,56	98,17	99,81	99,99	9,35	8,93
- Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana Panti Asuhan / Jompo	96.152.000,00	178.860.000,00	101.310.000,00	100.000.000,00	96.051.666,00	95.128.710,00	172.699.800,00	99.454.550,00	99.809.330,00	96.040.830,00	98,94	96,56	98,17	99,81	99,99	9,35	8,93
<b>PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL (EKS NARAPIDANA, PSK, NARKOBA DAN PENYAKIT SOSIAL LAINNYA)</b>	28.554.000,00	146.070.000,00	105.360.000,00	98.500.000,00	95.975.000,00	21.328.750,00	133.647.830,00	99.794.450,00	91.423.300,00	92.597.150,00	74,70	91,50	94,72	92,82	96,48	93,65	123,54
- Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial	-	55.870.000,00	42.080.000,00	40.000.000,00	42.000.000,00	-	51.182.620,00	41.625.250,00	37.912.900,00	41.158.550,00	-	91,61	98,92	94,78	98,00	(6,16)	(4,76)
- Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial	28.554.000,00	90.200.000,00	63.280.000,00	58.500.000,00	53.975.000,00	21.328.750,00	82.465.210,00	58.169.200,00	53.510.400,00	51.438.600,00	74,70	91,42	91,92	91,47	95,30	42,69	61,32
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL</b>	361.370.000,00	503.410.000,00	463.855.000,00	245.716.100,00	313.270.070,00	355.766.085,00	495.680.715,00	460.131.850,00	242.337.955,00	305.827.108,00	98,45	98,46	99,20	98,63	97,62	2,98	2,76
- Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha	72.000.000,00	126.390.000,00	110.020.000,00	92.000.000,00	78.930.000,00	70.570.425,00	123.479.500,00	109.805.750,00	91.842.900,00	78.900.909,00	98,01	97,70	99,81	99,83	99,96	8,00	8,36

-	Peningkatan Jejaring Kerja Sama Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat	54.370.000,00	99.100.000,00	89.100.000,00	-	35.954.000,00	52.453.050,00	98.951.100,00	88.468.600,00	-	32.813.812,00	96,47	99,85	99,29	-	91,27	(6,96)	(5,49)
-	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	127.500.000,00	134.300.000,00	109.455.000,00	72.000.000,00	83.330.000,00	125.748.400,00	130.567.585,00	107.367.000,00	71.742.950,00	79.075.135,00	98,63	97,22	98,09	99,64	94,89	(7,91)	(9,22)
-	Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial	107.500.000,00	143.620.000,00	155.280.000,00	81.716.100,00	115.056.070,00	106.994.210,00	142.682.530,00	154.490.500,00	78.752.105,00	115.037.252,00	99,53	99,35	99,49	96,37	99,98	8,79	9,67
	<b>PROGRAM PELESTARIAN NILAI KEPAHLAWANAN DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL</b>	450.470.000,00	486.920.000,00	1.575.709.000,00	1.566.824.100,00	15.032.056.875,00	446.718.108,00	482.425.657,00	1.572.054.800,00	1.560.824.237,00	15.006.260.264,00	99,17	99,08	99,77	99,62	99,83	272,63	273,64
-	Penanaman Nilai Kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	154.600.000,00	145.000.000,00	258.775.000,00	1.153.424.100,00	14.499.542.875,00	154.560.890,00	143.439.812,00	257.106.350,00	1.148.488.352,00	14.478.897.954,00	99,97	98,92	99,36	99,57	99,86	393,77	394,86
-	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP) dan Monumen/Tugu Perjuangan	87.500.000,00	88.000.000,00	1.032.972.000,00	133.400.000,00	198.000.000,00	87.279.160,00	86.391.545,00	1.031.308.950,00	132.994.485,00	193.433.420,00	99,75	98,17	99,84	99,70	97,69	258,94	262,77
-	Pemeliharaan Monumen Perjuangan Tri Yudha Sakti	208.370.000,00	253.920.000,00	283.962.000,00	280.000.000,00	334.514.000,00	204.878.058,00	252.594.300,00	283.639.500,00	279.341.400,00	333.928.890,00	98,32	99,48	99,89	99,76	99,83	12,94	13,40
	Jumlah rata-rata pertumbuhan																60,64 %	64,73 %

Dari tabel tersebut diatas Rasio rata rata antara realisasi dengan anggaran dapat dikatakan baik yaitu tercapai diatas 90% dan pada tahun tertentu ada beberapa kegiatan yang rata-rata realisasinya tidak tercapai diatas 90% dikarenakan ada beberapa kegiatan yang tidak menjadi prioritas dan pada tahun yang sama terdapat kekurangan pagu anggaran. Sedangkan rata-rata pertumbuhan anggaran selama 5 tahun pada keseluruhan program tercapai 60,64% serta pertumbuhan rata-rata realisasi anggaran 64,73%.

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial**

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan kewajiban dari setiap pemerintah kepada warga masyarakatnya, namun demikian penyelenggaraan kesejahteraan sosial bukanlah suatu hal yang mudah karena permasalahan yang terjadi di dalamnya jauh sangat kompleks. Sebagaimana kita ketahui bahwa sasaran garapan dari Dinas Sosial Kabupaten Buleleng adalah para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang sebagian besar diantara mereka merupakan penduduk miskin yang tidak mampu menjalankan peran dan fungsi sosialnya di masyarakat secara wajar. Penyebab terjadinya berbagai permasalahan sosial yang diderita oleh para PMKS ini sangat bervariasi, hal tersebut kita dapat kelompokkan ke dalam 2 (dua) kelompok besar yaitu yang dikarenakan faktor eksternal dan internal, faktor eksternal diantaranya kejadian bencana alam/sosial, kebijakan pemerintah, serta pengaruh lingkungan, sedangkan faktor internal diantaranya tingkat pendidikan yang rendah serta keterbatasan fisik atau mental yang dimiliki oleh seorang individu.

Tuntutan masyarakat terhadap pemerintah terkait pelayanan dalam bidang kesejahteraan sosial ini sangatlah tinggi karena selain dirasakan langsung oleh masyarakat juga berhasil atau tidaknya suatu proses pembangunan yang dilakukan oleh suatu pemerintahan ialah semakin berkurangnya jumlah penduduk miskin pada daerah tersebut atau dengan kata lain warga masyarakatnya sejahtera.

Tuntutan terhadap kinerja Dinas Sosial Kabupaten Buleleng tidak hanya muncul dari masyarakat akan tetapi juga dari pihak pemerintah pusat maupun provinsi, hal tersebut tercermin dengan :

1. Adanya program-program dalam rangka penurunan angka kemiskinan di daerah, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial RI dalam Rencana Strategis Kementerian Sosial RI telah mengeluarkan program-program pro rakyat

diantaranya : Pemberian bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU), Pemberdayaan Fakir Miskin melalui program KUBE (Kelompok Usaha Bersama), Program Keluarga Harapan (PKH), Pelayanan dan Rehabilitasi kepada Penyandang Disabilitas melalui pemberdayaan disabilitas, bantuan Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPD-B), Pelayanan bagi Lanjut Usia Terlantar melalui program ASLUT (Asistensi Sosial Lanjut Usia terlantar) dan program strategis lainnya.

2. Program yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi melalui Dinas Sosial Provinsi Bali juga menyasar kepada keluarga miskin yaitu : program Bedah Rumah, Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE, Pemberdayaan Lansia dan penyandang Disabilitas dan program strategis lainnya yang bersumber dari dana APBD I.
3. Di diterbitkannya Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial, dimana tujuan dari SPM tersebut ialah menselaraskan penyelenggaraan pembangunan bidang kesejahteraan sosial sekaligus dalam rangka percepatan penuntasan permasalahan sosial di seluruh daerah di Indonesia sehingga menuntut pihak pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran serta sumber daya lainnya secara memadai guna mencapai target Standar Pelayanan Minimal (SPM). Disamping itu juga sesuai Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan kewenangan hendaknya mempedomani Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Terhadap Kebijakan dan program tersebut diatas yang telah banyak memberikan kontribusi terhadap penanganan PMKS di Kabupaten Buleleng, tentunya akan tetap menjadi focus bagi Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dalam meningkatkan penanganan PMKS di Kabupaten Buleleng.

## *Tantangan dan Peluang :*

### *1. Tantangan*

- a. Tingginya angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) ;
- b. Terbatasnya pengetahuan dan keterampilan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta pemahaman keluarga dan masyarakat;
- c. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) belum mampu menjangkau seluruh penduduk penyandang PMKS;
- d. Sinergi program penanggulangan kemiskinan belum terjalin dengan baik.
- e. Kesadaran masyarakat miskin untuk keluar dari kondisinya saat ini masih sangat rendah sehingga bantuan pemerintah cenderung memanjakan mereka;
- f. Belum maksimalnya partisipasi PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- g. Nilai-nilai kesetiakawanan sosial dan kearifan lokal yang semakin tergerus oleh budaya yang pragmatis dan materialistik sebagai akibat dari pengaruh globalisasi.

### *2. Peluang*

- a. Peran aktif masyarakat dan swasta membantu Pemerintah dalam mendukung pembangunan Kesejahteraan Sosial;
- b. Adanya dukungan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- c. Dukungan dari Lembaga-lembaga / organisasi sosial nasional dan internasional dalam penanganan PMKS;
- d. Adanya kesesuaian antara Program Pemerintah Pusat dan Provinsi terhadap penanganan PMKS di daerah;
- e. Adanya pedoman ataupun kebijakan baik berupa Undang-Undang, PP, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati serta peraturan lainnya yang menjadi pegangan dalam penanganan masalah sosial, sehingga penangannya menjadi lebih jelas terarah dan dapat dipertanggungjawabkan;
- f. Adanya dukungan anggaran dari Pemerintah, baik dari APBD Kabupaten Buleleng, APBD Provinsi Bali, APBN (TP maupun Dana Dekonsentrasi) dan sumber dana lainnya.

- g. Hasil analisis kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) Kabupaten Buleleng penanganan PMKS dan Pelayanan sosial masih menjadi hal yang perlu diperhatikan di Kabupaten Buleleng dalam upaya penurunan angka kemiskinan.

Seluruh permasalahan yang dikemukakan di atas merupakan tantangan sekaligus peluang bagi Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Buleleng, karena dengan adanya berbagai permasalahan tersebut Dinas Sosial Kabupaten Buleleng diharapkan akan mendapatkan berbagai kemudahan dalam upaya peningkatan jumlah anggaran maupun sarana dan prasarana guna peningkatan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Buleleng ditahun-tahun mendatang.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL**

Luas wilayah Kabupaten Buleleng adalah 1.365,88 Km<sup>2</sup> (24,25% Luas Wilayah Pulau Bali). Jumlah penduduk pada tahun 2016 sebanyak 642,3 ribu Jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai rata-rata 470 jiwa/km<sup>2</sup>. Secara administrasi Kabupaten Buleleng dibagi menjadi 9 Kecamatan, 19 Kelurahan, 129 Desa, 63 Lingkungan, 567 Dusun/Banjar Dinas dan 165 Desa Adat (Desa Pakraman).

Berdasarkan pola penggunaan lahan tahun 2016 terdiri atas lahan kering, 37,413 Ha (27,39%) kawasan hutan dan hutan lainnya 44.681 Ha (32,71%) dan perkebunan 31.834 Ha (23,31%). Pola penggunaan lahan ini cenderung mengalami perubahan setiap tahunnya, sebagai akibat adanya alih fungsi dari lahan pertanian (sawah) menjadi pemukiman atau prasarana lainnya. Kondisi ini menimbulkan masalah sosial baru antara lain kemiskinan, keterlantaran dan ketunaan sosial. Disamping itu juga memiliki lahan kritis dan rawan terhadap terjadinya bencana alam seperti kekeringan, banjir dan tanah longsor, angin puting beliung, gempa bumi, air laut pasang serta bencana sosial seperti kebakaran, kerusuhan massa/konflik sosial.

Patut disyukuri bahwa daerah Buleleng memiliki nilai-nilai budaya yang unik beserta keindahan panorama alamnya termasuk alam lautnya yang menjadikan daya tarik bagi wisatawan nusantara dan manca negara sekaligus menjadi landasan pembangunan Kabupaten Buleleng pada khususnya dan Daerah Bali pada umumnya dan disamping itu masyarakat Buleleng juga memiliki keterampilan di bidang seni yang dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat, daerah dan negara. Kondisi ini perlu dijaga, dilestarikan dan dikembangkan sehingga dapat menjadi kekuatan didalam menangani penyandang masalah kesejahteraan sosial.

### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial

Dalam rangka peningkatan pelayanan telah diupayakan untuk melakukan pendataan terhadap kondisi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Buleleng selama Tahun 2012–2016 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel : 3.1.1

#### Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Di Kabupaten Buleleng Tahun 2012 - 2016

No	Kategori PMKS	Tahun														
		2012			2013			2014			2015			2016		
		L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML
1	Anak Balita Terlantar	171	151	321	171	151	321	135	95	239	128	94	222	14	16	30
2	Anak Terlantar	876	602	1478	876	602	1478	956	698	1654	953	691	1644	59	89	148
3	Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	-	-	-	-	-	-	36	4	40	35	4	39	7	10	17
4	Anak Jalanan	21	1	22	21	1	22	20	1	21	21	1	22	-	-	-
5	Anak Dengan Kedisabilitas an (ADK)	554	415	969	554	415	969	550	397	947	531	372	903	528	360	888
6	Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan Atau Diperlakuka n Salah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Anak Yang Memerluka n Perlindunga n Khusus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Lanjut Usia Terlantar	1850	3354	5204	1850	3354	5204	3262	6639	9901	1750	3545	5295	1307	2678	3985
9	Penyandang g Disabilitas	3012	2034	5046	3012	2034	5046	2784	2125	4909	2747	2029	4776	2782	1874	4656
10	Tuna Susila	-	20	20	-	20	20	-	27	27	-	29	29	-	35	35
11	Gelandanga n	8	6	14	8	6	14	8	13	21	8	9	17	6	13	19
12	Pengemis	8	6	14	8	6	14	8	13	21	5	7	12	6	15	21
13	Pemulung	5	8	13	5	8	13	7	8	15	8	8	16	9	9	18

14	Kelompok Minoritas	-	-	72	-	-	72	-	-	67	-	-	71	-	-	72
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Perasyarakatan	26	10	36	26	10	36	32	12	44	36	16	52	46	12	58
16	Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA)	52	37	89	52	37	89	66	58	124	65	59	124	99	63	162
17	Korban Penyalahgunaan Napza	23	7	30	23	7	30	26	6	32	31	2	33	50	1	51
18	Korban Trafficking	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Korban Tindak Kekerasan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Pekerja Migran Terlantar/Bermasalah Sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Korban Bencana Alam	2376	-	2376	2376	-	2376	398	-	398	1172	-	1172	637	-	637
22	Korban Bencana Sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52	-	52	-	-	-
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)	-	4264	4264	-	4264	4264	-	4225	4225	-	4208	4208	-	4208	4208
24	Fakir Miskin	7534	557	8091	7534	557	8091	45522	3709	49231	14899	1193	16092	14899	1193	16092
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Komunitas Adat Terpencil (KAT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber Data: Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

Berdasarkan tabel tersebut di atas, kondisi PMKS di Kabupaten Buleleng cenderung mengalami penurunan, namun di beberapa kategori mengalami kenaikan. Hal ini diakibatkan karena kompleksnya permasalahan sosial sehingga perlu penanganan yang terpadu. Berbagai kebijakan dan program serta kegiatan terus dilaksanakan secara berkesinambungan sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat terwujud, seperti meningkatkan kemampuan PMKS, Organisasi

Sosial/Panti Sosial dan memulihkan kehidupan sosial ekonomi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Secara umum capaian kinerja Dinas Sosial telah dapat mengurangi jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Pola penanganan yang dikembangkan tersebut dapat berupa Bimbingan dan Pelatihan Keterampilan Sosial, Bantuan Usaha Ekonomi Produktif dan Bantuan Perbaikan Gizi (sembako) bagi anak terlantar/anak balita terlantar, lanjut usia terlantar, keluarga miskin, penyandang disabilitas, wanita rawan sosial ekonomi, anak nakal, dan bantuan rumah tidak layak huni (bedah rumah), maupun pembinaan terhadap panti sosial/orsos guna meningkatkan kapasitas maupun kualitas kehidupannya. Sedangkan untuk penanganan kepada eks para korban diberikan bimbingan, motivasi sosial dan keterampilan praktis sesuai dengan potensi keterampilan dasar yang dimiliki serta potensi daerah masing-masing seperti beternak babi/kambing/sapi dan seterusnya termasuk pemberian bahan bangunan rumah.

Terhadap beberapa kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang mengalami kenaikan seperti bertambahnya kasus Penyandang HIV/AIDS dan bahkan penyebarannya sampai keseluruhan wilayah kecamatan. Hal ini diakibatkan karena kondisi dan perkembangan globalisasi yang disalahgunakan. Namun demikian semua bentuk permasalahan sosial tersebut di atas, telah diupayakan penanganannya secara bertahap dan berkesinambungan.

Perkembangan jumlah panti sosial baik yang mengasuh anak-anak maupun lanjut usia (jompo) tahun 2012-2016 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.1.2  
Jumlah Panti Asuhan dan Penghuni Panti

No	Tahun	Jumlah Panti Sosial Pemerintah	Jumlah Panti Asuhan Swasta	Jumlah Penghuni
1	2	3	4	5
1	2012	2	19	1.028
2	2013	2	19	995
3	2014	2	18	1.030
4	2015	2	18	1.076
5	2016	2	18	966

Sumber Data: Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

Dalam rangka ikut menangani masalah keterlantaran terhadap anak dan lanjut usia, di Kabupaten Buleleng terdapat 2 (dua) Panti Sosial milik Pemerintah Provinsi Bali yang berlokasi di Kabupaten Buleleng yaitu :

- Panti Sosial Asuhan Anak “UDYANA WIGUNA” yang menangani dan menampung anak terlantar dari keluarga kurang mampu/miskin atau anak yang sama sekali tidak mempunyai keluarga dengan jumlah daya tampung sebanyak 100 anak.
- Panti Sosial Tresna Werdha “JARA MARA PATI” yang berlokasi di Desa Kaliasem - Lovina yang menangani Lanjut Usia terlantar dari keluarga kurang mampu/miskin atau sama sekali tidak memiliki keluarga mendapatkan pelayanan sosial di Panti tersebut dengan daya tampung sebanyak 80 orang.

Selain Panti Sosial milik pemerintah terdapat pula 18 (delapan belas) Panti Asuhan Swasta yang dikelola oleh Yayasan yang menangani masalah balita/anak dan lanjut usia terlantar. Keberadaan Panti Asuhan Swasta yang merupakan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) ini sangat membantu Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam menjalankan fungsi dan peran dalam memberikan pelayanan terhadap keterlantaran yang ada.

Untuk itu Dinas Sosial Kabupaten Buleleng mempunyai peran dan fungsi memberikan pembinaan dan evaluasi terhadap pelayanan yang diberikan oleh Lembaga Panti tersebut.

Berdasarkan hasil pendataan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Kabupaten Buleleng tahun 2016 terdapat Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) 172 orang, Taruna Siaga Bencana (TAGANA) 99 orang, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) 18 LKS, Karang Taruna (KT) 146 KT, Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial (K3S) 1 lembaga, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) 1 lembaga, Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSMB) 167 WKSMB, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) 9 orang dan Dunia Usaha 295 Pengusaha, sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut :

**Tabel 3.1.3**  
**Rekapitulasi Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)**  
**Kabupaten Buleleng Tahun 2012 – 2016**

No	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Satuan	Tahun														
			2012			2013			2014			2015			2016		
			L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Pekerja Sosial Profesional	Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pekerja Sosial Masyarakat	Orang	52	-	52	52	-	52	72	-	72	87	3	90	100	15	115
3	Taruna Siaga Bencana (Tagana)	Orang	71	3	74	71	3	74	71	3	74	74	3	77	77	3	80
4	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	Lemba ga	-	-	21	-	-	21	-	-	22	-	-	22	-	-	22
5	Karang Taruna (KT)	KT	-	-	95	-	-	95	-	-	103	-	-	119	-	-	139
6	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Lemba ga	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1
7	Keluarga Pionir	KK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat (WKS KBM)	Lemba ga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS)	Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Penyuluh Sosial	Orang	9	-	9	9	-	9	9	-	9	9	-	9	9	-	9
11	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	Orang	9	-	9	9	-	9	9	-	9	9	-	9	9	-	9
12	Dunia Usaha	Pengu saha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25

*Sumber data : Dinas Sosial Kabupaten Buleleng*

Sebagaimana diuraikan dalam data diatas terhadap permasalahan sosial yang ada dan mengacu kepada permasalahan yang bersifat makro seperti dalam tabel berikut :

Tabel 3.1.4

Permasalahan Pokok Untuk Penentuan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah Memperhatikan Data Dan Jenis Pelayanan

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	2	3	4
1	Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Belum optimalnya peningkatan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar	Rendahnya kualitas kesejahteraan sosial bagi PMKS.

Dari uraian tersebut diatas Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Sosial yang menjadi **permasalahan pokok urusan sosial** yaitu:

- a. Masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Buleleng akibat rendahnya perlindungan sosial terhadap masyarakat miskin.
- b. Masih tingginya angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Buleleng;
- c. Rendahnya aksesibilitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terhadap pelayanan dasar;

Rendahnya kualitas kesejahteraan sosial Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS);

### 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih sebagai Isu Strategis Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

Sebagaimana diketahui bahwa **Visi** Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 ialah:

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT BULELENG  
YANG MANDIRI, SEJAHTERA, DAN BERDAYA SAING BERLANDASKAN  
TRI HITA KARANA”**

- a. Penjabaran makna dari **Visi** :
1. **Mandiri** mengandung makna: Kemampuan Pemerintah Daerah bersama masyarakat Buleleng mengelola pembangunan daerah sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
  2. **Sejahtera** mengandung makna: Terpenuhinya hak dasar masyarakat untuk kehidupan yang berkualitas.
  3. **Berdaya Saing** mengandung makna: Kemampuan daerah dalam mengatasi tantangan dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan komparatif dan kompetitif untuk peningkatan nilai tambah daerah.
  4. **Berlandaskan *Tri Hita Karana*** mengandung makna: Berlandaskan hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan lingkungan alam dan isinya, dan manusia dengan manusia.
- b. Berkaitan dengan Visi tersebut diatas, maka dirumuskan kedalam 6 **Misi** sebagai berikut :
1. ***Memantapkan Pembangunan Ekonomi untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif;***
  2. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis pada Produk Unggulan Daerah;
  3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional, Berbudaya dan Berintegritas;
  4. Memantapkan Partisipasi Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan;
  5. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah untuk Pemenuhan Pelayanan Publik;

6. Mewujudkan Pembangunan Buleleng yang Berbudaya dan Berkelanjutan (*Sustainable Development*).

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah/masyarakat pada masa yang akan datang. Ada 7 (tujuh) kriteria yang digunakan untuk memilih isu strategis, yaitu: bersifat lintas sektor, bersifat lintas wilayah, dapat berupa fenomena atau persoalan nyata, berdampak negatif jangka panjang jika tidak diselesaikan, berpotensi mengganggu pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, potensi dampaknya kumulatif dan berefek ganda dan potensi dampaknya lebih luas dari wilayah perencanaan. Di samping itu, kondisi lingkungan eksternal, kebijakan pembangunan nasional, provinsi, rencana tata ruang dan rencana pembangunan jangka panjang sebagaimana diuraikan di atas, merupakan referensi untuk memperkaya perumusan isu strategis Kabupaten Buleleng.

Dengan menganalisis kondisi yang ada, mengacu berbagai referensi dan menetapkan kriteria seperti disebutkan di atas, visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih telah merumuskan **isu-isu strategis** yang menjadi tantangan pokok Kabupaten Buleleng diantaranya yaitu : ***Integrasi program pengentasan kemiskinan dan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) pada berbagai sektor kehidupan bermasyarakat belum optimal;***

Dari Visi, Misi dan Isu Strategis yang tertuang dalam Pembangunan Daerah Tahun 2017-2022, maka telah ditetapkan beberapa program strategis daerah yaitu :

- a. Program pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya.
- b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.
- c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- d. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pokok tersebut diatas diantaranya :

1. Belum semua Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dapat terlayani dan mendapat program perlindungan sosial.

2. Sumber Daya Manusia khususnya keluarga miskin belum mampu mengelola bantuan yang diberikan.
3. Adanya kepedulian sosial masyarakat untuk membantu keluarga miskin melalui beberapa komunitas sosial.

Dalam upaya penentuan isu-isu strategis dalam lingkup tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dan melihat permasalahan sosial yang ada serta untuk melaksanakan urusan dibidang Sosial merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten Buleleng, perlu dikedepankan kerangka berpikir yang dapat dirumuskan untuk menentukan **Isu-isu Strategis** yang ada sebagai berikut ;

- a) Masih tingginya angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memberi kontribusi terhadap tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Buleleng.
- b) Belum optimalnya integrasi antar program dan peran aktif masyarakat khususnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam membantu menangani masalah sosial di Kabupaten Buleleng.
- c) Masih besarnya jumlah penduduk miskin, karena kurang berkembangnya usaha ekonomi produktif keluarga miskin, yang disebabkan oleh terbatasnya akses keluarga miskin dalam memanfaatkan sumberdaya pembangunan untuk mengembangkan usaha perekonomiannya.

Penetapan isu-isu strategis tersebut dilakukan melalui suatu proses analisa dengan mereview kembali faktor-faktor pendorong dan penghambat yang mempengaruhi permasalahan pelayanan sosial oleh Dinas Sosial Kabupaten Buleleng bila ditinjau dari analisis lingkungan strategis dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai dasar acuan dalam pengambilan dan penetapan isu-isu strategis bidang sosial serta dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

### 3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra Provinsi / Kabupaten

Dalam melaksanakan pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng untuk 5 tahun kedepan 2017-2022 didukung pula dengan kesesuaian Strategis dan Kebijakan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah berdasarkan analisis yang ada.

Analisis Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra Perangkat Daerah (PD) Provinsi/Kabupaten dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Buleleng terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra Dinas Sosial Provinsi Bali sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan masing-masing Perangkat Daerah.

Tabel 3.3.1  
Isu-isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan

Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal
1	2	3
1. Penanganan Sosial	1. Kesejahteraan Sosial 2. Korban Narkotika 3. Peningkatan Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah	1. Masih tingginya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial masyarakat (PMKS) 2. Belum optimalnya pelayanan dan rehabilitasi sosial 3. Masih tingginya penduduk miskin 4. Masih perlunya kemitraan dengan dunia usaha

Disamping isu strategis berkelanjutan tersebut dalam pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang capaiannya dimulai dari tahun 2017 hingga tahun 2030 diharapkan Rencana Aksi Nasional TPB dapat diselaraskan dengan Rencana Aksi Daerah TPB (RAD TPB), tentunya program dan kegiatan menyesuaikan berdasarkan tupoksi dan kewenangan masing-masing Kementerian Sosial RI, Dinas Sosial Provinsi dan Dinas Sosial Kabupaten.

Penyelarasan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.3.2

Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

<b>TUJUAN GLOBAL</b>	<b>SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019</b>	<b>SASARAN KABUPATEN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>I. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun</b>	1.1. Menurunnya tingkat kemiskinan pada tahun 2019 menjadi 7-8% (2015: 11,13%)	Meningkatnya perlindungan sosial terhadap masyarakat miskin
	2.2. Meningkatnya persentase penyandang difabilitas miskin dan rentan yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar pada tahun 2019 menjadi 17,12 %	Meningkatnya kualitas hidup, kemandirian dan keberfungsian sosial dan kesejahteraan Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) termasuk penyandang disabilitas.
	2.3. Menurunnya jumlah keluarga sangat miskin yang mendapat bantuan tunai bersyarat menjadi 2,8 juta pada tahun 2019.	Meningkatnya kualitas hidup, kemandirian dan keberfungsian sosial dan kesejahteraan Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS).
	4.2 Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam/ sosial hingga tahun 2019 menjadi 151 ribu.	Meningkatnya kualitas hidup, kemandirian dan keberfungsian sosial dan kesejahteraan Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) termasuk korban bencana.
<b>III. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk semua usia</b>	5.1. Meningkatnya jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapat rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan pada tahun 2019 menjadi 210 dan di luar panti pada tahun 2019 menjadi 85	Meningkatnya kualitas hidup, kemandirian dan keberfungsian sosial dan kesejahteraan Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) termasuk Korban NAPZA.

Strategi yang digunakan antara Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota juga ada beberapa diantaranya yang berbeda, namun ada beberapa strategi makro yang juga diikuti oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan kondisi dan situasi daerah dan permasalahan serta kemampuan sumber daya yang dimiliki.

Tabel 3.3.3  
Kebijakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

<b>NO</b>	<b>KEMENSOS RI</b>	<b>DINSOS PROV. BALI</b>	<b>DINSOS KAB/KOTA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Meningkatkan dan pemeratakan pelayanan sosial yang adil, dalam arti bahwa setiap orang khususnya penyandang masalah kesejahteraan sosial berhak memperoleh pelayanan sosial.	Meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat sehingga dapat menjalankan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat	Meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
2.	Meningkatkan profesionalisme SDM kesejahteraan sosial berbasis pekerjaan sosial dalam penanganan masalah dan potensi kesejahteraan sosial	Meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat sehingga dapat menjalankan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat	Meningkatkan profesionalisme pelayanan sosial, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat ataupun dunia usaha terhadap PMKS.

3.	Memantapkan manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta koordinasi.	Penggalian dan peningkatan potensi serta sumber kehidupan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial perseorangan, keluarga, kelompok dan lembaga masyarakat sehingga dapat menjalankan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat
4.	Menciptakan iklim dan sistem yang mendorong peningkatan dan pengembangan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.	Penggalian dan peningkatan potensi serta sumber kehidupan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Meningkatkan peran aktif potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
5.	Mendukung terlaksananya kebijakan desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembangunan berdasarkan keberagaman dan keunikan nilai sosial budaya serta mengedepankan potensi dan sumber sosial keluarga dan masyarakat setempat.	Penggalian dan peningkatan potensi serta sumber kehidupan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Meningkatkan pelestarian, penghayatan serta pengamalan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.

Rumusan kebijakan Kementerian Sosial RI, Dinas Sosial Provinsi Bali dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota menunjukkan sudah adanya sinergi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Kebijakan Kementerian Sosial RI untuk

pemerataan pelayanan telah diterjemahkan oleh Provinsi dan Kabupaten/Kota ke dalam kebijakan yang lebih teknis dengan mempermudah akses PMKS terhadap pelayanan sosial dasar. Kebijakan Kementerian Sosial RI untuk meningkatkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial juga didukung oleh Dinas Sosial Provinsi dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota.

Strategi penyelenggaraan kesejahteraan sosial pada Kementerian Sosial RI dapat dirumuskan ke dalam 4 strategi penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yaitu Kampanye Sosial, Kemitraan Sosial, Partisipasi Sosial dan Advokasi dan Pendampingan Sosial. Keseluruhan strategis tersebut digunakan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Buleleng termasuk di Dinas Sosial Provinsi Bali. Strategi 1 kampanye sosial tidak digunakan oleh Dinas Sosial Provinsi Bali maupun Dinas Sosial Kabupaten/Kota. Sedangkan strategi kemitraan sosial, partisipasi sosial, advokasi dan pendampingan sosial digunakan oleh Dinas Sosial Provinsi Bali dan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng. Identifikasi rumusan strategi dapat dilihat pada matrik berikut :

Tabel 3.3.4

Strategi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

<b>NO</b>	<b>KEMENSOS REPUBLIK INDONESIA</b>	<b>DINSOS PROVINSI BALI</b>	<b>DINSOS KABUPATEN BULELENG</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Kampanye Sosial	-	-
2.	Kemitraan Sosial	Kemitraan Sosial	Kemitraan Sosial
3.	Partisipasi Sosial	Partisipasi Sosial	Partisipasi Sosial
4.	Advokasi dan Pendampingan Sosial	Advokasi dan Pendampingan Sosial	Advokasi dan Pendampingan Sosial
5.	-	Pemberdayaan dan Bantuan Sosial	Pemberdayaan dan Bantuan Sosial

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Buleleng Tahun 2013-2033 merumuskan 3 (tiga) arahan pokok, yakni berkenaan dengan rencana struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis kabupaten. Rencana struktur ruang wilayah memberikan arahan pembentukan sistem pusat kegiatan wilayah kawasan perkotaan dan perdesaan serta sistem jaringan prasarana wilayah yang menunjang keterkaitan pusat-pusat kegiatan tersebut. Salah satu kawasan yang menunjang program penanganan terkait tugas dan fungsi Dinas Sosial adalah Penanganan Kawasan rawan bencana alam meliputi : rawan bencana angin kencang, tanah longsor, gelombang pasang dan rawan banjir. RTRW Kabupaten Buleleng secara umum juga mendukung untuk penanganan masalah kesejahteraan sosial melalui berbagai penataan jaringan dan system jaringan prasarana utama yang berpihak kepada pelayanan publik seperti jalan dan transportasi yang dapat menunjang dalam peningkatan perekonomian masyarakat.

Terkait dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) hasil Focus Group Discussion (FGD) adalah salah satunya tentang : Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Pelayanan Sosial.

Pengaruh rencana pola ruang dan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) terhadap kebutuhan pelayanan khususnya kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah bagaimana program-program Pemerintah Daerah dapat memihak hak-hak orang miskin dengan:

1. Memberikan prioritas pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) pada wilayah pola ruang saat ini;
2. Melakukan alokasi dan fasilitasi penerusan hak-hak ekonomi sosial dan budaya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
3. Melakukan partisipasi integrasi dan inklusi sosial warga masyarakat untuk mencegah konflik sosial;
4. Mengintegrasikan program penanggulangan kemiskinan;
5. Memberdayakan masyarakat keluarga Fakir Miskin;
6. Memberdayakan dan meningkatkan peran aktif Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Sebagai faktor penghambat dan pendorong terkait hasil KLHS dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial adalah sebagai tabel berikut :

**Tabel 3.3.5**

**Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial berdasarkan Analisis KLHS beserta faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilannya**

No	Hasil KLHS Terkait Tugas dan Fungsi Dinas Sosial	Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Masih tingginya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Keluarga miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial belum tertangani dengan baik	Keluarga miskin tidak tahu dan tidak merasa miskin, kesenjangan ekonomi wilayah	Merupakan salah satu program prioritas daerah
			Mobilitas mereka rendah, sulit dijangkau	Budaya kekeluargaan yang kuat
2	Belum optimalnya pelayanan sosial	Masalah pelayanan sosial belum tertangani dengan baik	Pengetahuan keterampilan, dan wawasan masyarakat	Jiwa sosial dalam masyarakat yang kuat
		Kemitraan dengan dunia usaha perlu ditingkatkan	Kemitraan pemerintah dengan dunia usaha yang kurang	Dana CSR dapat digunakan untuk mengurangi masalah sosial

### 3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis

Faktor yang mempengaruhi pelayanan Dinas Sosial dalam penentuan isu-isu strategis diantaranya :

1. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan kewajiban dari setiap pemerintah kepada warga masyarakatnya, namun demikian penyelenggaraan kesejahteraan sosial bukanlah suatu hal yang mudah karena permasalahan yang terjadi di dalamnya jauh sangat kompleks. Sebagaimana kita ketahui bahwa sasaran garapan dari Dinas Sosial Kabupaten Buleleng adalah para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang sebagian besar diantara mereka merupakan penduduk miskin yang tidak mampu menjalankan peran dan fungsi sosialnya di masyarakat secara wajar.
2. Tantangan dan peluang dalam penyelenggaraan pelayanan Dinas Sosial yaitu : Tingginya angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Terbatasnya pengetahuan dan keterampilan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) serta rendahnya pemahaman keluarga dan masyarakat, Belum maksimalnya partisipasi PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Sedangkan yang menjadi peluang dalam pelayanan sosial yaitu : Adanya peran aktif masyarakat dan swasta membantu Pemerintah dalam mendukung pembangunan Kesejahteraan Sosial, Adanya dukungan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Adanya kesesuaian antara Program Pemerintah Pusat dan Provinsi terhadap penanganan PMKS di daerah , Adanya dukungan anggaran dari Pemerintah, baik dari APBD Kabupaten Buleleng, APBD Provinsi Bali, APBN (TP maupun Dana Dekonsentrasi) dan sumber dana lainnya.
3. Sasaran jangka menengah sebagai kebijakan Rencana Strategis K/L (Kementerian Sosial RI) dalam mendukung Renstra Dinas Sosial Kabupaten Buleleng diantaranya adalah Meningkatkan dan pemeratakan pelayanan sosial yang adil, dalam arti bahwa setiap orang khususnya penyandang masalah kesejahteraan sosial berhak memperoleh pelayanan sosial dan Menciptakan iklim dan sistem yang mendorong peningkatan dan pengembangan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

4. Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Provinsi Bali dalam kebijakan sebagai faktor pendorong : Meningkatnya kualitas kesejahteraan sosial perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat sehingga dapat menjalankan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat.
5. Sedangkan sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Sosial Kabupaten Buleleng adalah Meningkatnya perlindungan sosial terhadap masyarakat miskin.
6. Implikasi KLHS bagi pelayanan Dinas Sosial yaitu : Masih tingginya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan belum optimalnya pelayanan sosial.

Terhadap faktor-faktor tersebut Dinas Sosial menggunakan metode pendekatan bersifat lintas sektor, bersifat lintas wilayah, dapat berupa fenomena atau persoalan nyata (data valid), berdampak negatif jangka panjang jika tidak diselesaikan, berpotensi mengganggu pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, potensi dampaknya kumulatif dan berefek ganda dan potensi dampaknya lebih luas dari wilayah perencanaan. Atas dasar tersebut selanjutnya dapat disimpulkan **Isu Strategis** yang akan ditangani melalui Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial selama 5 tahun ke depan yaitu tahun 2017-2022 diantaranya :

- a) Masih tingginya angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memberi kontribusi terhadap tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Buleleng.
- b) Belum optimalnya peran aktif masyarakat khususnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam membantu menangani masalah sosial di Kabupaten Buleleng.
- c) Masih besarnya jumlah penduduk miskin, karena kurang berkembangnya usaha ekonomi produktif keluarga miskin, yang disebabkan oleh terbatasnya akses keluarga miskin dalam memanfaatkan sumberdaya pembangunan untuk mengembangkan usaha perekonomiannya.

# BAB IV

## TUJUAN DAN SASARAN

### DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG

Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Buleleng tahun 2017-2022 ditetapkan berdasarkan masing-masing misi pembangunan daerah, dan setiap tujuan dijabarkan menjadi sasaran dengan indikator-indikatornya. Adapun tujuan dan sasaran beserta masing-masing indikator yang dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dalam RPJMD Kabupaten Buleleng 2017-2022 sesuai misi I (satu) yang telah ditetapkan di atas adalah seperti berikut :

Tabel 4.1  
**Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD  
 Kabupaten Buleleng 2017 - 2022**

Misi 1. Memantapkan Pembangunan Ekonomi untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif;

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI AWAL (2017)	TARGET					KONDISI AKHIR (2022)
					2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pertumbuhan ekonomi yang inklusif	Meningkatnya perlindungan sosial terhadap masyarakat miskin	1. Persentase PMKS yang tertangani	2,75%	3,40%	4,00%	4,60%	5,20%	5,80%	5,80%
			2. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	4,28 %	12,80%	15,40%	18,00%	19,30%	20,50%	20,50%

Sedangkan Arah Kebijakan dalam RPJMD yaitu :

1. Peningkatan dan pemerataan pelayanan sosial bagi penyandang masalah sosial; dengan indikator sasarannya : % PMKS yang tertangani.
2. Peningkatan upaya pemberdayaan fakir miskin, komunitas adatterpencil dan PMKS, dengan indikator sasarannya : % PMKS yang memperoleh bantuan sosial.

Dari penyelenggaraan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang diuraikan dalam RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022, dan dikaitkan dengan isu strategis Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dapat dirumuskan dalam rumusan tugas, kewajiban dan rancangan tindakan yang dijadikan arahan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah bentuk layanan untuk memenuhi tuntutan yang dituangkan dalam visi dan misi Kepala Daerah tujuan dan sasaran yang harus dicapai yaitu :

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Kabupaten Buleleng**

##### 4.1.1 Tujuan :

Tujuan penyelenggaraan pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dalam rangka pencapaian tujuan RPJMD yaitu : “ **Pertumbuhan ekonomi yang inklusif** “ melalui tujuan yaitu :

“Meningkatnya efektifitas pelayanan terhadap penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Nilai Kepahlawanan“. Guna tercapainya tujuan tersebut dilaksanakan melalui :

1. *Menyelenggarakan perlindungan sosial, bantuan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi sosial serta pemberdayaan dan pengembangan sosial **dengan tujuan** menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar, perlindungan dan peningkatan keberfungsian sosial, kemandirian serta keberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);*
2. *Mengembangkan partisipasi masyarakat lembaga atau organisasi sosial **dengan tujuan** Meningkatkan pembinaan, pengetahuan dan partisipasi tenaga kesejahteraan sosial masyarakat dalam penanganan PMKS dan mengembangkan kemampuan LKS dan dunia usaha dalam menyelenggarakan pelayanan kesos yang profesional;*
3. *Mengembangkan dan memperkuat nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial **dengan tujuan** Menumbuhkan semangat nasionalisme serta kesetiakawanan sosial bagi masyarakat dan generasi*

muda dan menjamin kesejahteraan keluarga pahlawan sebagai bentuk penghargaan terhadap jasa-jasa para pahlawan.

#### 4.1.2 Sasaran :

Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, yang merupakan penjabaran dari tujuan penyelenggaraan pembangunan bidang kesejahteraan sosial ialah : “ **Meningkatnya perlindungan sosial terhadap masyarakat miskin**” melalui :

- a. Meningkatkan kualitas hidup, kemandirian, keberfungsian sosial dan kesejahteraan Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS).
- b. Meningkatkan pengetahuan, kemampuan, partisipasi dan jangkauan pelayanan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan PMKS.
- c. Meningkatkan nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Kab. Buleleng 2017-2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun ke -				
				5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya efektifitas pelayanan terhadap penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Nilai Kepahlawanan	1. Meningkatkan kualitas hidup, kemandirian, keberfungsian sosial dan kesejahteraan Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mengalami peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan keberfungsian sosial.</li> </ul>	3,40% (2.261 orang)	4,00% (2.569 orang)	4,60% (2.837 orang)	5,20% (2.941 orang)	5,80% (3.018 orang)
		2. Meningkatkan peran aktif	Peningkatan Potensi Sumber Kesejahteraan	10%	15%	20%	25%	30%

		masyarakat dalam melaksanakan pelayanan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Sosial (PSKS) dalam pelayanan dan rehabilitasi sosial					
		3. Meningkatnya nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	Peningkatan nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	18%	18%	18%	18%	18%

# BAB V

## STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

### DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG

#### 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan dalam RPJMD

Strategi dan Arah Kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 dalam pencapaian Misi 1 yaitu :

Tabel 5.1.1  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

<b>VISI</b> : TERWUJUDNYA MASYARAKAT BULELENG YANG MANDIRI, SEJAHTERA, DAN BERDAYA SAING BERLANDASKAN <i>TRI HITA KARANA</i>			
<b>MISI I</b> : Memantapkan Pembangunan Ekonomi untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif.			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
Pertumbuhan ekonomi yang inklusif	Meningkatnya perlindungan sosial terhadap masyarakat miskin.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar.</li> <li>Meningkatkan perlindungan sosial dan pemberdayaan Usaha Ekonomi bagi PMKS.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan dan pemerataan pelayanan sosial bagi penyandang masalah sosial.</li> <li>Peningkatan upaya pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan PMKS.</li> </ul>

Tabel 5.1.2  
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kabupaten Buleleng

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya perlindungan sosial terhadap masyarakat miskin	Meningkatkan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar.	Peningkatan dan pemerataan pelayanan sosial bagi penyandang masalah sosial.	Persentase PMKS yang tertangani	2,75%	5,80%	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Sosial	Dinsos
						Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.	Sosial	Dinsos

	Meningkatkan perlindungan sosial dan pemberdayaan Usaha Ekonomi bagi PMKS.	Peningkatan upaya pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan PMKS.	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	4,28%	20,50%	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya	Sosial	Dinsos
						Program Pemberdayaan kelembagaan Kesejahteraan Sosial.	Sosial	Dinsos

## 5.2. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

### 5.2.1. Strategi

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut di atas, telah ditetapkan beberapa strategi pembangunan di bidang Kesejahteraan Sosial sebagai upaya penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial secara optimal yaitu :

1. **Meningkatkan Aksesibilitas masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar**, strateginya melalui :
  - a. Menyelenggarakan bantuan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan pengembangan sosial.
  - b. Mengembangkan partisipasi masyarakat lembaga atau organisasi sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
  - c. Mengembangkan dan memperkuat nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial
2. **Meningkatkan perlindungan sosial dan pemberdayaan usaha ekonomi bagi PMKS**, strateginya melalui :
  - a. Menyelenggarakan perlindungan sosial, pemberdayaan dan pengembangan sosial.

### 5.2.2 Arah Kebijakan

1. **Meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial bagi PMKS** melalui meningkatkan kualitas Kesejahteraan Sosial perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat sehingga dapat menjalankan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat.

2. **Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam melaksanakan pelayanan sosial bagi PMKS/Masyarakat miskin** melalui Penggalian dan peningkatan potensi serta sumber kehidupan penyandang masalah Kesejahteraan Sosial.
3. **Meningkatkan potensi sumber daya dalam penanaman nilai kepahlawanan dan jiwa nasionalisme** melalui meningkatkan dan memperkuat nilai keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial dalam memantapkan revolusi mental bagi generasi muda dan masyarakat.

Tabel 5.2.1

Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Sosial

Sasaran	Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran	
	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3
Meningkatnya kualitas hidup, kemandirian dan keberfungsian sosial dan kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).	Menyelenggarakan perlindungan sosial, bantuan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi sosial serta pemberdayaan dan pengembangan sosial.	Meningkatkan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sesuai UU nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial.
Meningkatnya pengetahuan, kemampuan, partisipasi dan jangkauan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Mengembangkan partisipasi masyarakat lembaga atau organisasi sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.	Meningkatkan peran aktif dan profesionalisme pelayanan sosial, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat ataupun dunia usaha terhadap PMKS sesuai UU nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial.
Meningkatnya Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial	Mengembangkan dan memperkuat nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	Meningkatkan potensi dan sumber daya dalam penanaman nilai kepahlawanan dan jiwa nasionalisme sesuai UU nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial.

# **BAB VI**

## **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

### **6.1. Rencana Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng.**

Cara mencapai tujuan dan penetapan tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam Bab sebelumnya dapat dilakukan melalui program-program pembangunan pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

*Sebagai Program Penunjang meliputi :*

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** terdiri dari kegiatan :
  - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik.
  - c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor
  - d. Penyediaan Pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/ Operasional
  - e. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
  - f. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
  - g. Penyediaan Alat Tulis Kantor
  - h. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - j. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - k. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - l. Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat
  - m. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah/dalam daerah
  - n. Penyediaan jasa administrasi kepegawaian
  
- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**
  - a. Pembangunan Gedung Kantor Dinas Sosial
  - b. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
  - c. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
  - d. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
  - e. Pengadaan Mebeleur
  - f. Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara
  - g. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

- h. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- i. Pemeliharaan Rutin/ Berkala perlengkapan gedung kantor
- j. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
- k. Penataan Halaman Gedung /Lingkungan Kantor
- l. Partisipasi Dalam Rangka Peringatan Hari Besar Nasional/Daerah dan Pelaksanaan Event Nasional/Daerah

**3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
- b. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
- c. Pengadaan Pakaian Korpri
- d. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
- e. Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur

**4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

- a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

**5. Program Perencanaan Anggaran SKPD**

- a. Penyusunan anggaran SKPD

**6. Program Informasi Pembangunan Daerah**

- a. Penyelenggaraan Pameran / Pawai Pembangunan

**7. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) & Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya, yang terdiri dari beberapa kegiatan yaitu : (Bidang Dayasos dan Penanganan Fakir Miskin)**

- a. Peningkatan kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya
- b. Pelatihan Ketrampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin.
- c. Pelatihan Ketrampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

- 8. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, terdiri dari beberapa kegiatan : (Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial)**
  - a. Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi perdagangan perempuan dan anak.
  - b. Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial
  - c. Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal.
  - d. Pembinaan dan bimbingan motivasi kepada Lansia di luar panti.
  - e. Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak dengan kedisabilitas, anak nakal.
  
- 9. Program Pembinaan Anak Terlantar, dengan kegiatan : (Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial)**
  - a. Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar
  - b. Penyusunan data dan analisis permasalahan anak terlantar
  
- 10. Program Pembinaan Para Penyandang Disabilitas dan Trauma, terdiri dari beberapa kegiatan : (Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial)**
  - a. Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Disabilitas dan eks Trauma
  - b. Pendayagunaan para penyandang Disabilitas dan eks Trauma
  
- 11. Program Pembinaan Panti Asuhan /Panti Jompo, dengan kegiatan : (Bidang Dayasos dan Penanganan Fakir Miskin)**
  - a. Pendidikan dan Pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo
  - b. Peningkatan keterampilan tenaga pelatih dan pendidik
  - c. Pembinaan dan peningkatan kesejahteraan penghuni panti asuhan/jompo
  
- 12. Program Pembinaan Eks. Penyandang Penyakit Sosial (eks. Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya), dengan kegiatan : (Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial)**
  - a. Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial
  - b. Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial

**13. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, dengan kegiatan. (Bidang Dayasos dan Penanganan Fakir Miskin)**

- a. Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha.
- b. Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat.
- c. Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat

**14. Program Pelestarian Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial, dengan kegiatan : (Bidang Dayasos dan Penanganan Fakir Miskin)**

- a. Penanaman Nilai kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial
- b. Pemeliharaan taman Makam Pahlawan (TMP) dan Monumen/Tugu Perjuangan
- c. Pemeliharaan Monumen Perjuangan Tri Yudha Sakti
- d. Pemeliharaan Monumen dan Tugu Perjuangan **(UPT DINAS SOSIAL)**

**15. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan kegiatan : (Bidang Perlindungan Jaminan Sosial)**

- a. Penanganan Masalah-masalah Strategis Yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa.
- b. Pemutakhiran data penduduk miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial lainnya.
- c. Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Jaminan Sosial.

## **6.2 Indikasi Pendanaan Program dan Kegiatan Dalam Jangka Menengah.**

Sebagaimana diuraikan diatas bahwa Dinas Sosial dalam menjabarkan tupoksinya melaksanakan Program dan Kegiatan pembangunan dalam jangka menengah. Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, maka disusun Matriks Program dan pendanaan Jangka Menengah Dinas Sosial Kabupaten Buleleng periode 2017-2022 sebagai pedoman dalam perencanaan dan penganggaran SKPD Dinas Sosial Kabupaten Buleleng. Adapun indikasi pendanaan adalah sebagai berikut :

Tabel 6.2

## RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG TAHUN 2018-2022

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA SKPD PENANG GUNGJAWAB	LOKASI
								TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TARGET	RP		
								TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi		Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	1.01.06.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Output : Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	85%	85%	1,446,939,000	90%	1,588,997,300	100%	1,638,707,400	100%	1,607,000,900	100%	1,878,016,000	100%	8,159,660,600	Dinas Sosial	
				1.01.06.01.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Output : Jumlah surat terkirim	80 %	12 Bulan	53,000,000	12 Bulan	58,300,000	12 Bulan	64,130,000	12 Bulan	64,130,000	12 Bulan	70,500,000	60 Bulan	310,060,000	Dinas Sosial	
				1.01.06.01.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Output : Jumlah rekening telepon, air dan listrik yang terbayarkan	80 %	13 Rekening/Bulan	228,750,000	13 Rekening/Bulan	251,625,000	13 Rekening/Bulan	276,787,000	13 Rekening/Bulan	276,787,000	13 Rekening/Bulan	304,400,000	60 Rekening/Bulan	1,338,349,000	Dinas Sosial	

				1.01.06.01.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Out put : Jumlah jenis kendaraan dinas	80 %	12 Bulan	189,000,000	12 Bulan	247,000,000	12 Bulan	228,690,000	12 Bulan	228,690,000	12 Bulan	251,500,000	60 Bulan	1,144,880,000	Dinas Sosial
				1.01.06.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Out put : Jumlah jenis kendaraan dinas yang dipelihara izinnya	10 %	3/22 Roda 4 dan /1 Roda 6 / Roda 2 / Tahun	9,000,000	3/22 Roda 4 dan /1 Roda 6 / Roda 2 / Tahun	9,900,000	3/22 Roda 4 dan /1 Roda 6 / Roda 2 / Tahun	10,890,000	3/22 Roda 4 dan /1 Roda 6 / Roda 2 / Tahun	10,890,000	3/22 Roda 4 dan /1 Roda 6 / Roda 2 / Tahun	11,900,000	15/110 Roda 4 dan /5 Roda 6 / Roda 2 / Tahun	52,580,000	Dinas Sosial
				1.01.06.01.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Out put : Jumlah jenis laporan keuangan	10 %	12 Bulan	253,605,000	12 Bulan	272,800,000	12 Bulan	300,800,000	12 Bulan	300,800,000	12 Bulan	330,000,000	60 Bulan	1,456,565,000	Dinas Sosial
				1.01.06.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Out put : Jumlah lingkungan kantor terpeliharaan	80 %	12 Bulan	157,288,000	12 Bulan	173,016,000	12 Bulan	190,318,000	12 Bulan	190,318,000	12 Bulan	209,300,000	60 Bulan	920,240,000	Dinas Sosial
				1.01.06.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Out put : Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	80 %	12 Bulan	44,859,000	12 Bulan	49,344,000	12 Bulan	54,279,000	12 Bulan	54,279,000	12 Bulan	59,700,000	60 Bulan	262,461,000	Dinas Sosial
				1.01.06.01.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Out put : Jumlah dan tersedia anyar barang cetakan dan penggandaan	80 %	12 Bulan	17,740,000	12 Bulan	19,514,000	12 Bulan	21,465,000	12 Bulan	21,465,000	12 Bulan	23,600,000	60 Bulan	103,784,000	Dinas Sosial

			1.01.06 .01.01. 012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Output : Jumlah dan jenis kompo nen listrik/p enerangan bangunan kantor yang memadai	80 %	12 Bulan	10,00 0,000	12 Bulan	11,00 0,000	12 Bulan	12,10 0,000	12 Bulan	12,10 0,000	12 Bulan	13,30 0,000	60 Bulan	58,50 0,000	Dinas Sosial
			1.01.06 .01.01. 013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Output : Jumlah dan jenis kebutu han peralat an dan perleng kapan kantor	80 %	27 Unit	153,2 50,00 0	30 Unit	82,07 5,000	30 Unit	76,25 0,400	30 Unit	44,54 3,900	30 Unit	160,0 16,00 0	147 Unit	516,1 35,30 0	Dinas Sosial
			1.01.06 .01.01. 015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Output : Jumlah bahan- bahan bacaan dan perund ang-undang an yang tersed ia	80 %	6 / 12 Bulan	11,00 0,000	6 / 12 Bulan	12,10 0,000	6 / 12 Bulan	13,31 0,000	6 / 12 Bulan	13,31 0,000	6 / 12 Bulan	14,60 0,000	30 / 60 Jenis / Bulan	64,32 0,000	Dinas Sosial
			1.01.06 .01.01. 017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Output : Jumlah makan an dan minum an yang tersed ia	90 %	12 Bulan	23,20 2,000	12 Bulan	25,52 2,000	12 Bulan	28,07 4,000	12 Bulan	28,07 4,000	12 Bulan	30,80 0,000	60 Bulan	135,6 72,00 0	Dinas Sosial
			1.01.06 .01.01. 018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsult	Output : Jumlah kali koordinasi dilaksa	90 %	1 Tahun	164,3 95,00 0	1 Tahun	187,0 06,30 0	1 Tahun	205,7 00,00 0	1 Tahun	205,7 00,00 0	1 Tahun	226,2 00,00 0	5 Tahun	989,0 01,30 0	Dinas Sosial

				asi ke Luar Daerah /Dalam Daerah	nakan															
			1.01.06 .01.01.022.	Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	Output : Jumlah dan tercatat nya administrasi kepegawaian lingkup SKPD	90 %	1 Tahun	131,850,000	1 Tahun	189,795,000	1 Tahun	156,634,000	1 Tahun	156,634,000	1 Tahun	172,200,000	5 Tahun	807,113,000	Dinas Sosial	
		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dan mendukung tugas dan fungsi PD	1.01.06 .01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Output : Porsentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dan mendukung tugas dan fungsi perangkat daerah	80%	80%	436,661,000	90%	446,000,000	100%	491,600,000	100%	486,502,000	100%	610,485,000	100%	2,471,248,000	Dinas Sosial	
			1.01.06 .01.02.003.	Pembangunan Gedung Kantor	Output : Jumlah unit gedung kantor dibangun	80 %	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Sosial	
			1.01.06 .01.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Output : Jumlah kendaraan operasional kantor tersedia	80 %	3 Unit	60,000,000	2 Unit	40,000,000	2 Unit	35,000,000	2 Unit	35,000,000	3 Unit	60,000,000	12 Unit	230,000,000	Dinas Sosial	

			1.01.06 .01.02. 007.	Pengad aan Perleng kapan Gedung Kantor	Out put	: Jumlah perleng kapan kantor yang memad ai	80 %	2 Unit	20,00 0,000	3 Jenis	40,00 0,000	4 Unit	24,20 0,000	4 Unit	16,62 0,000	4 Unit	29,28 2,000	17 Unit	130,1 02,00 0	Dinas Sosial
			1.01.06 .01.02. 009.	Pengad aan Peralat an Gedung Kantor	Out put	: Jumlah peralat an gedung kantor yang memad ai	80 %	2 Jenis	47,90 0,000	1 Unit	2,600 ,000	3 Jenis	27,95 0,000	3 Jenis	31,75 4,000	3 Jenis	40,13 0,000	11 / 1 Unit	150,3 34,00 0	Dinas Sosial
			1.01.06 .01.02. 010.	Pengad aan Mebele ur	Out put	: Jumlah mebele ur kantor yang memad ai	80 %	2 Jenis	6,800 ,000	17 Buah	42,50 0,000	5 Jenis	8,220 ,000	3 Jenis	9,050 ,000	3 Jenis	9,955, 000	13 / 17 Jenis / Buah	76,52 5,000	Dinas Sosial
			1.01.06 .01.02. 012.	Penyele nggaran dan Pengad aan Sarana/ Prasara na Upacar a	Out put	: Jumlah kali tersele nggara nya upacar a keaga maan	10 %	12 Bulan	122,5 00,00 0	12 Bulan	123,5 00,00 0	12 Bulan	139,1 30,00 0	12 Bulan	145,2 16,00 0	12 Bulan	168,3 71,00 0	60 Bulan	698,7 17,00 0	Dinas Sosial
			1.01.06 .01.02. 022.	Pemeli haraan Rutin/B erkala Gedung Kantor	Out put	: Jumlah keterse diaan tempat kerja yang nyama n	80 %	1 Paket	65,46 1,000	1 Paket	72,00 0,000	1 Paket	59,20 0,000	1 Paket	67,12 8,000	1 Paket	75,84 1,000	5 Paket	339,6 30,00 0	Dinas Sosial
			1.01.06 .01.02. 024.	Pemeli haraan Rutin/B erkala Kendar aan Dinas/ Operasi onal	Out put	: Jumlah kendar aan dinas yang layak dipakai	80 %	12 Bulan	79,00 0,000	12 Bulan	86,90 0,000	12 Bulan	90,92 0,000	12 Bulan	70,51 9,000	12 Bulan	111,0 33,00 0	60 Bulan	438,3 72,00 0	Dinas Sosial

			1.01.06 .01.02. 028.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Output : Jumlah peralatan gedung kantor yang memadai	80 %	12 Bulan	35,000,000	12 Bulan	38,500,000	12 Bulan	42,350,000	12 Bulan	46,585,000	12 Bulan	51,243,000	60 Bulan	213,678,000	Dinas Sosial
			1.01.06 .01.02. 054.	Partisipasi Dalam Rangka Peringatan Hari Besar Nasional / Daerah dan Pelaksanaan Event Nasional / Daerah	Output : Jumlah kegiatan lomba yang diikuti	- -	- -	-	- -	-	1 Tahun	64,630,000	1 Tahun	64,630,000	1 Tahun	64,630,000	3 Tahun	193,890,000	Dinas Sosial
			1.01.06 .01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Output : Persentase disiplin aparat ur dalam melaksanakan tugas dan fungsi perangkat daerah	80%	80%	117,050,000	90%	109,000,000	100%	118,900,000	100%	155,636,000	100%	146,769,000	100%	647,355,000	Dinas Sosial
			1.01.06 .01.03. 002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Output : Jumlah jenis pakaian diadakan	80 %	- -	-	30 Stel	10,000,000	- -	-	- -	-	30 Stel	15,000,000	60 Stel	25,000,000	Dinas Sosial

				1.01.06.01.03.003.	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Output : Jumlah jenis pakaian diadakan	80 %	-	-	-	-	30 Stel	10,000,000	-	-	-	-	30 Stel	10,000,000	Dinas Sosial							
				1.01.06.01.03.004.	Pengadaan Pakaian KORPRI	Output : Jumlah jenis pakaian diadakan	80 %	-	-	-	-	-	-	30 Stel	10,000,000	-	-	-	30 Stel	10,000,000	Dinas Sosial						
				1.01.06.01.03.005.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari2 Tertentu	Output : Jumlah jenis pakaian diadakan	80 %	81	Stel	27,050,000	30	Stel	9,000,000	85	Stel	18,900,000	51	Stel	25,846,000	81	Stel	30,000,000	328	Stel	110,796,000	Dinas Sosial	
				1.01.06.01.03.006.	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Output : Jumlah kali pembinaan iman pegawai dilaksanakan	80 %	35	Orang	90,000,000	1	LS	90,000,000	1	LS	90,000,000	1	LS	119,790,000	1	LS	101,769,000	5	LS	491,559,000	Dinas Sosial	
			Persentase Serapan Anggaran Sesuai Target	1.01.06.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Output : Persentase serapan anggaran sesuai target	100%	100%	106,951,580	100%	124,200,000	100%	136,600,000	100%	150,338,000	100%	165,372,000	100%	683,461,580	Dinas Sosial							
				1.01.06.01.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Output : Jumlah dan jenis dokumen laporan disusun	100 %	7	Laporan	106,951,580	7	Laporan	124,200,000	7	Laporan	136,600,000	7	Laporan	150,338,000	7	Laporan	165,372,000	35	Jenis Laporan	683,461,580	Dinas Sosial	



				1.01.06 .01.15.	Program Pemb rdayaa n Fakir Miskin, Komuni tas Adat Terpen cil (KAT) dan Penyan dang Masala h Keseja h teraa n Sosial (PMKS) Lainnya	Out co me	: Persen tase PMKS yang memp eroleh bantua n sosial	89%	15,9%	851,5 00,00 0	14,5%	587,1 00,00 0	14,5%	645,9 50,00 0	14,5%	710,0 88,00 0	14,5%	781,0 97,00 0	64,25%	3,575, 735,0 00	Dinas Sosial							
				1.01.06 .01.15. 001	Peningk atan Kemam puan (Capaci ty Buildin g) petugas dan penda mping sosial pember dayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya	Out put	: Jumlah penda mping sosial yang dibina	74 0 / 14 8	Ora ng / Des a	14 8	Orang / Desa	101,0 00,00 0	14 8	Desa / Kelura han	111,1 50,00 0	14 8	Desa / Kelura han	122,3 50,00 0	14 8	Desa / Kelura han	134,4 31,00 0	14 8	Desa / Kelura han	147,8 74,00 0	148	Desa / Kelura han	616,8 05,00 0	Dinas Sosial

				1.01.06 .01.15. 002	Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin	Output : Jumlah Fakir Miskin yang terampil dalam mengembangkan Usaha Ekonomi Produktif melalui KUBE	2,460	KK	100	Orang /KK	292,500,000	100	Orang	321,850,000	100	Orang	354,100,000	100	Orang	389,317,000	100	Orang	428,249,000	500	Orang	1,786,016,000	Dinas Sosial
				1.01.06 .01.15. 005	Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	Output : Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) yang terampil dalam mengembangkan UEP	212	Orang	40	Orang	140,000,000	40	Orang	154,100,000	40	Orang	169,500,000	40	Orang	186,340,000	40	Orang	204,974,000	200	Orang	854,914,000	Dinas Sosial
				1.01.06 .01.15. 007	Pemutakhiran data penduduk miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Output : Jumlah data penduduk miskin dan PMKS yang tersusun	148	Desa / Kelurahan	148	Desa / Kelurahan	318,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148	Desa / Kelurahan	318,000,000	Dinas Sosial

				1.01.06.01.16.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Outcome : Persentase PMKS yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial	19.74%	15.40%	559,000,000	15.40%	846,200,000	15.40%	819,170,000	15.40%	901,087,000	15.40%	991,195,000	77.10%	4,116,652,000	Dinas Sosial
				1.01.06.01.16.002	Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak	Output : Jumlah perempuan dan anak yang mendapat pelayanan dan perlindungan sosial, hukum berupa sosialisasi	50 Orang	20 Orang	30,000,000	55 Orang	36,300,000	55 Orang	36,300,000	55 Orang	39,930,000	55 Orang	43,923,000	240 Orang	186,453,000	Dinas Sosial
				1.01.06.01.16.003	Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Output : Jumlah PMKS yang mengikuti KIE Konseling	10,000 Orang	25 Orang	20,000,000	1,000 Orang	24,200,000	1,000 Orang / Masyarakat	24,200,000	1,000 Orang / Masyarakat	26,620,000	1,000 Orang / Masyarakat	29,282,000	425 Orang	124,302,000	Dinas Sosial

				1.01.06.01.16.004	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal	Output : Jumlah anak nakal yang mengikuti pelatihan keterampilan berusaha	140	Anak	20	Orang	95,000,000	20	Orang	114,950,000	-	-	-	-	-	-	-	40	Orang	209,950,000	Dinas Sosial		
				1.01.06.01.16.012	Pembinaan dan bimbingan motivasi kepada Lansia di luar panti	Output : Jumlah lanjut usia yang mendapatkan pembinaan, bimbingan dan bansos	4,132	Orang	920	Orang	414,000,000	820	Orang	670,750,000	820	Orang	643,720,000	820	Orang	708,092,000	820	Orang	778,901,000	420	Orang	3,215,463,000	Dinas Sosial
				1.01.06.01.16.014	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak dengan disabilitas, anak nakal	Output : Jumlah anak nakal yang mengikuti pelatihan keterampilan berusaha	-	-	-	-	-	-	-	-	20	Orang	114,950,000	20	Orang	126,445,000	20	Orang	139,089,000	60	Orang	380,484,000	Dinas Sosial

				1.01.06 .01.17.	Progra m pembin aan anak terlant ar	Out co me	: Persen tase anak terlant ar yang menda pat penang anan	80%	41.80%	260,0 00,00 0	30.20%	336,0 00,00 0	35.20%	369,6 00,00 0	40.30%	406,5 60,00 0	45.30%	447,2 16,00 0	45.30%	1,819, 376,0 00	Dinas Sosial
				1.01.06 .01.17. 002.	Pelatih an ketera mpilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlant ar	Out put	: Jumlah anak terlant ar yang menda pat pelatih an ketera mpilan berusa ha dan menda pat bantua n sosial	1,884 Anak	84 Anak	260,0 00,00 0	60 Anak	286,0 00,00 0	70 Anak	314,6 00,00 0	80 Anak	346,0 60,00 0	90 Anak	380,6 66,00 0	384 Anak	1,587, 326,0 00	Dinas Sosial
				1.01.06 .01.17. 003.	Penyus unan data dan analisis permas alahan anak terlant ar	Out put	: Jumlah data dan analisis permas alahan anak terlant ar	1 Doku men	- -	-	1 Doku men	50,00 0,000	1 Doku men	55,00 0,000	1 Doku men	60,50 0,000	1 Doku men	66,55 0,000	4 Doku men	232,0 50,00 0	Dinas Sosial
				1.01.06 .01.18.	Progra m Pembin aan Para Penyan dang Cacat dan Trauma	Out co me	: Persen tase penyan dang cacat dan eks trauma yang tertang ani	80%	9.60%	576,5 00,00 0	-	-	-	-	-	-	-	-	9.60%	576,5 00,00 0	Dinas Sosial

				1.01.06 .01.18. 003.	Pendidikan dan Pelatihan bagi Para Penyandang Cacat dan eks Trauma	Output : Jumlah penyandang cacat yang mendapat pelatihan keterampilan	88 0	Ora ng	50	Orang	101,5 00,00 0	-	-	-	-	-	-	-	50	Orang	101,5 00,00 0	Dinas Sosial					
				1.01.06 .01.18. 004.	Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan eks Trauma	Output : Jumlah penyandang cacat yang mendapat daya guna dan bantuan sosial	3, 12 3	Ora ng	59 1/ 1	Orang / Perda	475,0 00,00 0	-	-	-	-	-	-	-	591 /1	Orang / Perda	475,0 00,00 0	Dinas Sosial					
				1.01.06 .01.19.	Program pembinaan panti asuhan / panti jompo	Output : Persentase Panti Asuhan yang mendapat pembinaan	22%		21.00%		178,5 00,00 0	24.30%	306,1 50,00 0	24.30%	336,7 60,00 0	24.30%	370,4 41,00 0	24.30%	407,4 85,00 0	24.30%	1,599, 336,0 00	Dinas Sosial					
				1.01.06 .01.19. 004.	Pendidikan dan pelatihan bagi penghu ni panti asuhan / jompo	Output : Jumlah penghu ni panti yang mendapat pelatihan	36 0	Ora ng	-	-	-	17	Panti Asuhan	90,00 0,000	17	Panti Asuhan	99,00 0,000	17	Panti Asuhan	108,9 00,00 0	17	Panti Asuhan	119,7 90,00 0	17	Panti Asuhan	417,6 90,00 0	Dinas Sosial

				1.01.06 .01.19. 005.	Peningkatan ketrampilan tenaga pelatih dan pendidik	Output : Jumlah pengelolan panti yang mendapat peningkatan kualitas pelayanan	18	Panti Asuhan	18	Panti Asuhan	115,500,000	18	Panti Asuhan	127,050,000	18	Panti Asuhan	139,750,000	18	Panti Asuhan	153,730,000	18	Panti Asuhan	169,103,000	18	Panti Asuhan	705,133,000	Dinas Sosial
				1.01.06 .01.19. 007.	Pembinaan dan peningkatan kesejahteraan penghuni panti asuhan /jompo	Output : Jumlah panti yang diberdayakan dalam pelayanan sosial	9	Panti Asuhan	9	Panti Asuhan	63,000,000	9	Panti Asuhan	89,100,000	9	Panti Asuhan	98,010,000	9	Panti Asuhan	107,811,000	9	Panti Asuhan	118,592,000	9	Panti Asuhan	476,513,000	Dinas Sosial
				1.01.06 .01.20.	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkob dan penyakit sosial lainnya	Outcome : Persentase penyandang penyakit sosial yang tertangani	37%		19.20%		236,500,000	19.50%		260,150,000	19.50%		286,160,000	19.50%		314,781,000	19.50%		346,259,000	87.20%		1,443,850,000	Dinas Sosial

				1.01.06 .01.20. 001.	Pendi- kan dan pelatih- an ketera- mpilan berusa- ha bagi eks- penyan- dang penyaki- t sosial	Out put	:	Jumlah eks- narapid- ana yang menda- pat pelatih- an ketera- mpilan dan bantua- n usaha	24 0	Ora- ng	30	Orang	91,50 0,000	30	Orang	100,6 50,00 0	30	Orang	110,7 10,00 0	30	Orang	121,7 86,00 0	30	Orang	133,9 65,00 0	150	Orang	558,6 11,00 0	Dinas Sosial
				1.01.06 .01.20. 004.	Pember- dayaan eks- penyan- dang penyaki- t sosial	Out put	:	Jumlah eks- penyan- dang penyak- it sosial yang dibina dan menda- pat pelaya- nan sosial	50 0	Ora- ng	13 0	Orang	145,0 00,00 0	15 0	Orang	159,5 00,00 0	15 0	Orang	175,4 50,00 0	15 0	Orang	192,9 95,00 0	15 0	Orang	212,2 94,00 0	730	Orang	885,2 39,00 0	Dinas Sosial
				1.01.06 .01.21.	Progra- m Pembe- rdayaa- n Kelemb- agaan Keseja- hteraan Sosial	Out co- me	:	Persen- tase PSKS yang aktif dalam pembe- rdayaa- n kelemb- agaan sosial	36%		5.20%		594,2 00,00 0	5.30%		275,0 00,00 0	5.30%		302,5 00,00 0	5.30%		332,7 50,00 0	5.30%		366,0 25,00 0	26.60%		1,870, 475,0 00	Dinas Sosial

				1.01.06 .01.21. 001.	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha		Jumlah masyarakat dan PSKS yang mendapat penyuluhan sosial	2,000	Orang	250	Orang	100,000,000	250	Orang	110,000,000	250	Orang	121,000,000	250	Orang	133,100,000	250	Orang	146,410,000	1250	Orang	610,510,000	Dinas Sosial
				1.01.06 .01.21. 002.	Peningkatan jejaring kerjasama pelaku usaha kesejahteraan teraan sosial masyarakat	Output :	Jumlah WKSBM (Suka Duka) yang meningkat dalam pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial	30	Suka Duka	2	Karang Taruna	50,000,000	2	Karang Taruna	55,000,000	2	Karang Taruna	60,500,000	2	Karang Taruna	66,550,000	2	Karang Taruna	73,205,000	10	Karang Taruna	305,255,000	Dinas Sosial
				1.01.06 .01.21. 003.	Peningkatan kualitas SDM kesejah teraan sosial masyarakat	Output :	Jumlah Karang Taruna, PSM, TKSK yang mendapat pembinaan	14 / 8	KT / PS M	9,9	Karang Taruna, PSM dan TKSK	100,000,000	9,9	Karang Taruna, PSM dan TKSK	110,000,000	9,9	Karang Taruna, PSM dan TKSK	121,000,000	9,9	Karang Taruna, PSM dan TKSK	133,100,000	9,9	Karang Taruna, PSM dan TKSK	146,410,000	45,45 dan 9	Karang Taruna, PSM dan TKSK	610,510,000	Dinas Sosial
				1.01.06 .01.21. 004.	Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial	Output :	Jumlah jenis lembaga perlindungan sosial	1	Lembaga	2 / 18	Lembaga / Orang	344,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 / 18	Lembaga / Orang	344,200,000	Dinas Sosial

				1.01.06 .01.22.	Progra m Pelesta rian Nilai Kepahl awana n dan esetiak awana n sosial	Out co me	: Persen tase pening katan pelesta rian TMP/ Monu men dan nilai kepahl awana n	50%	18%	1,529 ,699, 528	18%	1,665 ,500, 000	18%	1,832 ,000, 000	18%	2,015 ,265, 000	18%	1,816, 791,0 00	90%	8,859, 255,5 28	Dinas Sosial
				1.01.06 .01.22. 001.	Penana man Nilai Kepahl awanan dan kesetiak awana n sosial	Out put	: Jumlah, jenis, kali model penana man nilai kepahl awana n	50 00 / 5 Ora ng / Kegi ata n	40 0 / 5 Orang / Kegiat an	497,8 60,00 0	40 0 / 5 Orang / Kegiat an	547,6 46,00 0	40 0 / 5 Orang / Kegiat an	602,3 90,00 0	40 0 / 5 Orang / Kegiat an	662,6 51,00 0	40 0 / 5 Orang / Kegiat an	597,3 90,00 0	400 / 5 Orang / Kegiat an	2,907, 937,0 00	Dinas Sosial
				1.01.06 .01.22. 002.	Pemeli haraan Taman Makam Pahlaw an (TMP) dan Monu men/Tu gu Perjuan gan	Out put	: Jumlah TMP, Monu men dan Tugu yang menda pat perawa tan	5 Mo nu me n	5 Monu men	281,8 40,00 0	5 Monu men	292,8 64,00 0	5 Monu men	322,1 30,00 0	5 Monu men	354,3 65,00 0	5 Monu men	317,1 30,00 0	5 Monu men	1,568, 329,0 00	Dinas Sosial
				1.01.06 .01.22. 004.	Pemeli haraan UPT Monu men dan Tugu Perjuan gan	Out put	: Jumlah Monu men dan Tugu Perjuan gan yang dipelih ara	6 Mo nu me n	5 Monu men / Tugu Perjuan gan	749,9 99,52 8	5 Monu men / Tugu Perjuan gan	824,9 90,00 0	5 Monu men / Tugu Perjuan gan	907,4 80,00 0	5 Monu men / Tugu Perjuan gan	998,2 49,00 0	5 Monu men / Tugu Perjuan gan	902,2 71,00 0	5 Monu men / Tugu Perjuan gan	4,382, 989,5 28	Dinas Sosial

				1.01.06 .01.24.	Progra m Perlind ungan dan Jamina n Sosial	Out co me	: Persen tase PMKS yang terdata dan menda pat perlind ungan dan jamina n sosial	84%	84%	195,0 00,00 0	84%	981,4 00,00 0	84%	1,079 ,500, 000	84%	1,187 ,518, 000	84%	1,306, 269,0 00	84%	4,749, 687,0 00	Dinas Sosial							
				1.01.06 .01.24. 001	Penang anan masala h- masala h strategi s yang menya ngkut tangga p cepat darurat dan kejadia n luar biasa	Out put	: Jumlah masala h strategi bencana, orang terlant ar dan mayat terlant ar yang tertang ani	75 0	Ora ng	60 0/ 10	KK / Orang	195,0 00,00 0	50 0/ 10	KK / Orang	214,5 00,00 0	50 0/ 10	KK / Orang	235,9 00,00 0	50 0/ 10	KK / Orang	259,5 45,00 0	50 0/ 10	KK / Orang	285,4 99,00 0	275 0/ 36	KK / Orang	1,190, 444,0 00	Dinas Sosial
				1.01.06 .01.24. 002	Pemuta khiran data pendud uk miskin, (PMKS) dan PSKS lainnya	Out put	: Jumlah data pendud uk miskin dan PMKS yang tersusu n	-	-	-	-	-	14 8	Desa / Kelura han	330,0 00,00 0	14 8	Desa / Kelura han	363,0 00,00 0	14 8	Desa / Kelura han	399,3 00,00 0	14 8	Desa / Kelura han	439,2 30,00 0	148	Desa / Kelura han	1,531, 530,0 00	Dinas Sosial
				1.01.06 .01.24. 003	Penge mbang an model kelemb agaan perlind ungan jamina n sosial	Out put	: Jumlah jenis lembag a perlind ungan sosial	-	-	-	-	-	1	Lemb aga	436,9 00,00 0	1	Lemb aga	480,6 00,00 0	1	Lemb aga	528,6 73,00 0	1	Lemb aga	581,5 40,00 0	1	Lemb aga	2,027, 713,0 00	Dinas Sosial

				1.01.06 .01.25.	Progra m Pembin aan Para Penyan dang Disabili tas dan Trauma	Out co me	: Persen tase penyan dang disabili tas dan eks trauma yang tertang ani	-	-	-	9.60%	744,1 00,00 0	9.60%	818,5 00,00 0	9.60%	900,4 21,00 0	9.60%	990,4 63,00 0	38.40%	3,453, 484,0 00	Dinas Sosial
				1.01.06 .01.25. 001.	Pendi kan dan Pelatih an bagi Para Penyan dang Disabili tas dan eks Trauma	Out put	: Jumlah penyan dang disabili tas yang menda pat pelatih an ketera mpilan	-	-	-	50 Orang	111,6 00,00 0	50 Orang	122,8 00,00 0	50 Orang	135,0 96,00 0	50 Orang	148,6 06,00 0	200 Orang	518,1 02,00 0	Dinas Sosial
				1.01.06 .01.25. 002.	Penday agunaa n Para Penyan dang Disabili tas dan eks Trauma	Out put	: Jumlah penyan dang disabili tas yang menda pat daya guna dan bantua n sosial	-	-	-	53 Orang	632,5 00,00 0	53 Orang	695,7 00,00 0	53 Orang	765,3 25,00 0	53 Orang	841,8 57,00 0	212 Orang	2,935, 382,0 00	Dinas Sosial
										7,304 ,501, 108		8,500 ,797, 300		9,130 ,047, 400		9,817 ,897, 900		10,56 0,902, 000		45,31 4,145, 708	Dinas Sosial

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN DINAS SOSIAL YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

#### **7.1 Indikator Kinerja Urusan Sosial yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Buleleng maka dapat sampaikan indikator kinerja Dinas Sosial Kabupaten Buleleng untuk lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 sebagaimana seperti tabel 7.1. berikut :

**Tabel 7.1**

#### **Indikator Kinerja Dinas Sosial yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2017)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2022)
			2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	8
1	Persentase PMKS yang tertangani	2,75%	3,40%	4,00%	4,60%	5,20%	5,80%	5,80%
2	Persentase PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial	4,28%	12,80%	15,40%	18,00%	19,30%	20,50%	20,50%

## 7.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Sosial

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan perlu ditetapkan indikator Kinerja yang akan dilaksanakan sehingga memiliki arah, tujuan dan sasaran yang jelas dalam pelaksanaannya. Indikator Kinerja yang ditetapkan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Kunci (IKK) terdapat 8 Indikator serta target sasaran yang harus dicapai dalam lima tahun kedepan yaitu sebagaimana dalam Tabel 7.2 berikut :

**Tabel 7.2.**  
**Aspek dan Indikator Kinerja menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan**  
**Tingkat Outcome**

No	Bidang/ Urusan Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2017)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2022)
			2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase PMKS yang tertangani	2,75% (53.207 orang)	3,40%	4,00%	4,60%	5,20%	5,80%	5,80% (11.971 orang)
2	Persentase PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial	4,28% (11.767 orang)	12,80%	15,40%	18,00%	19,30%	20,50%	20,50% (10.120 orang)
3	Persentase PMKS skala kabupaten yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	100% (9.875 orang)	10,5%	10,5%	10,5%	10,5%	10,5%	52,5% (5.180 orang)
4	Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.	100 % (2.460 KK)	4%	4%	4%	4%	4%	20% (500 orang)
5	Persentase PMKS yang mendapat perlindungan sosial dan pemberdayaan.	80 % (48.064 orang)	5%	6%	7%	7%	8%	33% (15.861 orang)

6	Persentase Panti Sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan sosial.	100 % (18 Buah)	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %	100 % (18 Buah)
7	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	100 % (30 buah)	3%	3%	3%	3%	3%	15% (10 buah)
8	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Sedangkan Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah sebagai berikut :

NO	Bidang/Urusan/Indikator Layanan Urusan Wajib Dasar	RUMUS (Formulasi)
<b>6.</b>	<b>Sosial</b>	
6.1	Persentase PMKS yang tertangani	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang tertangani}}{\text{Jumlah PMKS yang ada}} \times 100\%$
6.2	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang diberikan bantuan}}{\text{Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan}} \times 100\%$
6.3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial}} \times 100\%$
6.4	Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.	$\frac{\text{Jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis}}{\text{Jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis}} \times 100\%$
6.5	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	$\frac{\text{Jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos}}{\text{Jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos}} \times 100\%$
6.6	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	$\frac{\text{Jumlah WKBSM dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesos}}{\text{Jumlah WKBSM dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos}} \times 100\%$

6.7	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat.	<p>Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun x100%</p> <hr/> <p>Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun</p>
6.8	Persentase penyandang disabilitas fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial.	<p>Jumlah penyandang disabilitas fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 tahun x100%</p> <hr/> <p>Jumlah penyandang disabilitas fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial dalam 1 tahun</p>

# **BAB VIII**

## **P E N U T U P**

### **8.1. KAJIDAH PELAKSANAAN**

Rencana Strategik (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Buleleng 2017-2022 ini disusun disamping berdasarkan analisis kajian lingkungan hidup strategis juga mempedomani ataupun berdasarkan RPJM Daerah Kabupaten Buleleng tahun 2017-2022. Renstra ini substansinya memuat tentang tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program pembangunan yang nantinya menjadi acuan di dalam penyelenggaraan pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang menjadi kewenangan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dalam 5 tahun ke depan.

Renstra ini juga menjadi pedoman/acuan di dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Sosial Buleleng serta dalam penyusunan Lakip Dinas Sosial Kabupaten Buleleng.

Untuk dapat berhasilnya pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dalam lima tahun ke depan, maka dipandang perlu menetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh Bagian/Bidang yang ada didalam jajaran kelembagaan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang ada dalam Renstra Dinas Sosial Kabupaten Buleleng sehingga dapat mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
2. Perlu adanya konsistensi dan sinergi antar bidang dalam perencanaan pembangunan, sehingga dalam implementasinya terpadu dan terintegrasi;
3. Perlu adanya dukungan dan komitmen yang sungguh-sungguh dari Pemerintah Kabupaten Buleleng dan *stakeholders* lainnya untuk mendukung pelaksanaan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Buleleng sehingga dapat mewujudkan tujuan dan sasaran kinerja Dinas Sosial Kabupaten Buleleng serta sasaran Pembangunan Kabupaten Buleleng dalam 5 (lima) tahun ke depan.

## 8.2. PENUTUP

Pada prinsipnya, Rencana Strategis ini merupakan komitmen bersama seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Sosial Kabupaten Buleleng. Karena merupakan komitmen bersama, maka seluruh pimpinan dan staf terlibat secara aktif dalam perumusannya serta bertanggung jawab untuk mewujudkan tujuan serta sasaran yang hendak diraih.

Perlu juga ditegaskan bahwa sebuah rencana strategis adalah pedoman selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Agar tujuan dan sasaran yang digariskan dalam Rencana Strategis ini dapat diwujudkan, maka penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng harus selalu berpedoman pada Rencana Strategis yang telah disusun. Namun demikian, hal ini tidak berarti menghilangkan fleksibilitas dan adaptasi terhadap peluang dan tantangan yang berkembang. Penyesuaian-penyesuaian tetap perlu dilakukan mengingat bahwa kondisi yang dihadapi sangat dinamis dan kemampuan keuangan daerah untuk menyokong pelaksanaan program maupun kegiatan juga berubah setiap tahunnya. Yang perlu diingat adalah, semua adaptasi dilakukan semata-mata untuk menunjang pencapaian visi, misi Kepala Daerah tujuan, serta sasaran yang ingin dicapai.

Sebagai penutup, perlu diingat bahwa keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan hanya sebagaimana ditentukan oleh kualitas rencana yang disusun, selebihnya ditentukan oleh kemampuan dan kerja keras menerjemahkan rencana tersebut ke dalam eksekusi nyata.

Singaraja, ..... 2018

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng



**IGEDE SANDHIYASA, S.Sos, M.Si**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19650704 198602 1 009